

Monitoring Issue of Food, Energy and Sustainable Development

Sentralisasi Ekspor SDA dan Militerisasi Swasembada Pangan



Monitoring Issue of Food, Energy and Sustainable Development

Sentralisasi Ekspor SDA dan Militerisasi Swasembada Pangan

Abra Talattov
Head of Center

Annisa Utami Kusumanegara **Afaqa Hudaya**
Researcher *Researcher*

Aisyah Nur'aeni
Research Associate

Lutfi Shofi Rahmawati **Yusuf Taqy**
Research Assistant *Research Assistant*

Center of Food, Energy, and Sustainable Development (CFESD)



Ringkasan Eksekutif

Sepanjang Mei 2026, perekonomian Indonesia menghadapi tekanan eksternal yang meningkat akibat gejolak geopolitik global yang mendorong lonjakan harga energi dan komoditas strategis. Harga minyak Brent tercatat naik 67,5% (yoy), sementara harga gas alam, tembaga, dan nikel juga mengalami kenaikan signifikan. Di tengah kondisi tersebut, sektor migas menjadi sumber utama pelemahan kinerja perdagangan nasional dengan defisit mencapai USD 3,44 miliar pada April 2026 dan defisit kumulatif USD 8,52 miliar pada empat bulan pertama tahun ini.

Lebih lanjut, hasil analisis pembentukan PT Danantara Sumberdaya Indonesia (DSI) sebagai eksportir tunggal batubara, CPO, dan *ferroalloy* untuk mengatasi praktik *under-invoicing*, *transfer pricing*, dan pelarian devisa hasil ekspor menunjukkan bahwa selama 2014–2024, ketiga komoditas tersebut berpotensi menyebabkan hilangnya devisa sekitar USD 22,8 miliar, dengan lebih dari 90% berasal dari sektor batubara.

Di sektor pangan, tekanan harga global masih berlanjut, sementara inflasi pangan domestik meningkat menjelang Idul Adha akibat gangguan produksi dan logistik. Pemerintah juga memperkuat program swasembada pangan melalui keterlibatan TNI dalam percepatan produksi padi, jagung, dan kedelai. Sementara itu, sektor sawit menghadapi ketidakpastian transisi kebijakan sentralisasi ekspor sawit yang menekan harga TBS meskipun harga CPO global dan volume ekspor meningkat. Di sisi lain, kebijakan Devisa Hasil Ekspor (DHE) yang baru berpotensi meningkatkan likuiditas domestik hingga Rp503-625 triliun, namun memerlukan pengelolaan yang hati-hati agar tidak mengganggu rantai nilai dan daya saing ekspor nasional.

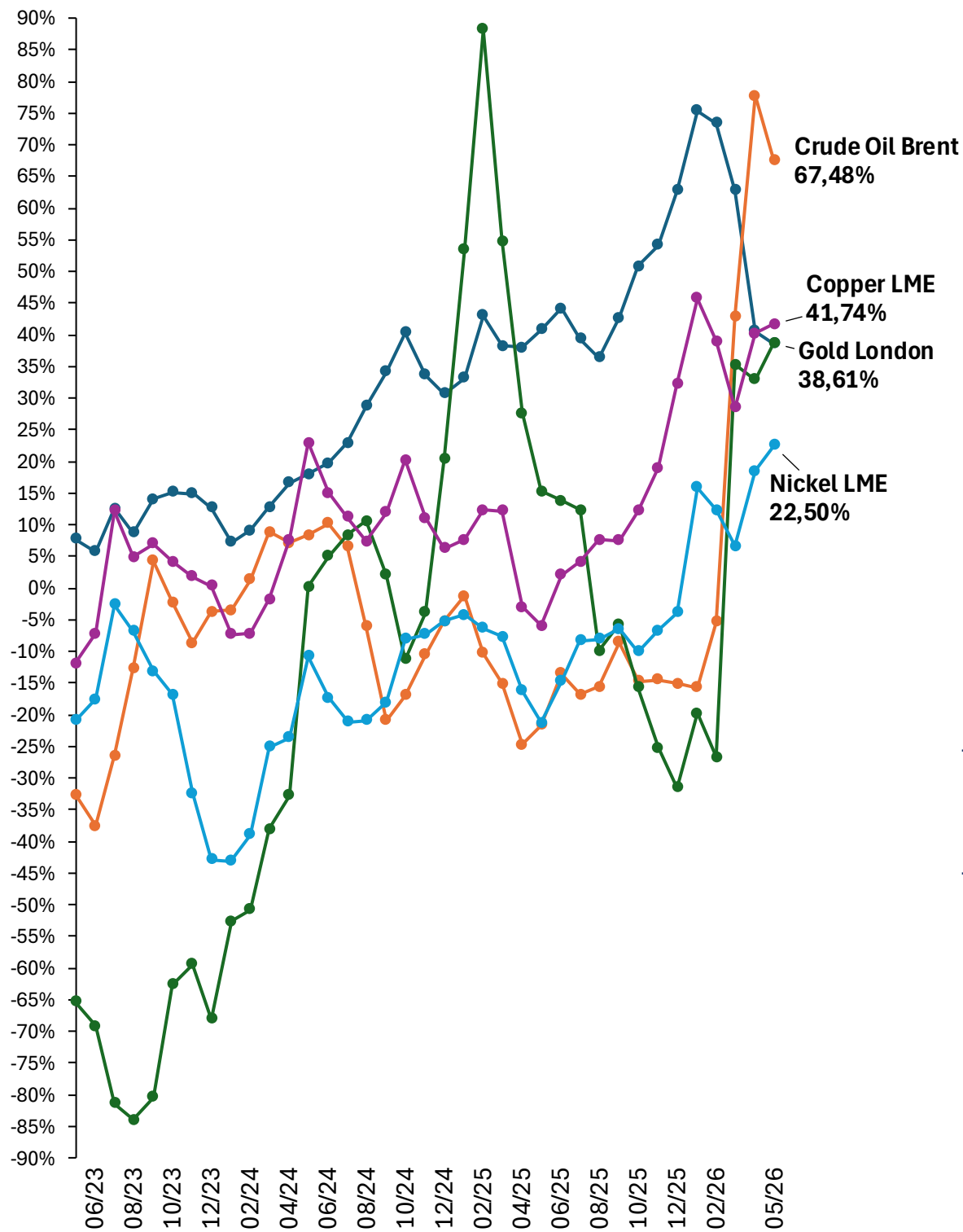


Skema Ekspor SDA Satu Pintu: Antara Konsolidasi Devisa dan Risiko Distorsi Pasar

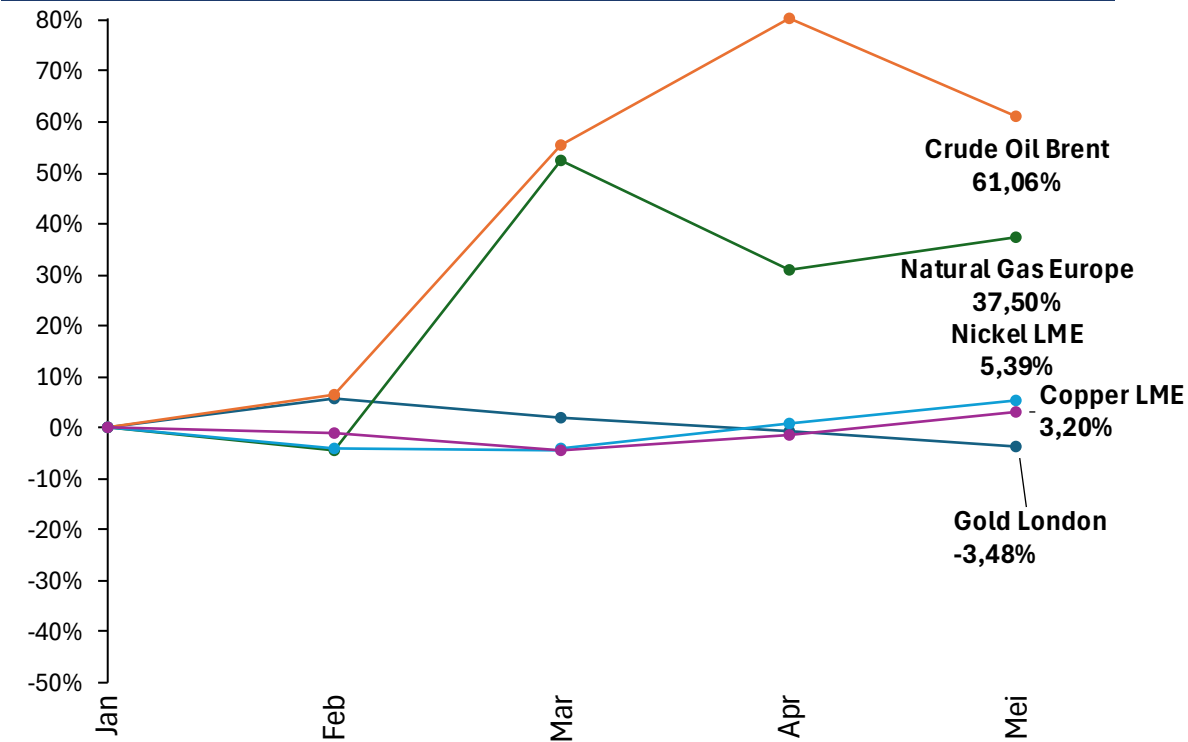


Ketegangan Geopolitik Berlanjut, Harga Energi Global Tetap Bergejolak

Commodity Price Growth (% , yoy)



Commodity Price Growth (% , ytd)



Perkembangan Harga Komoditas Energi – Mei 2026

Komoditas	Harga Mei 2026	%, MoM	%, YoY	%, YtD
Minyak Mentah Brent	\$107.54/bbl	-10.70%	+67.48%	+61.06%
Gas Alam (Eropa)	\$16.17/MMBtu	+4.93%	+38.68%	+37.50%
Emas (London)	\$4,587.21/troy oz	-2.84%	+38.61%	-3.48%
Nikel (LME)	\$18,805/mt	+4.44%	+22.50%	+5.39%
Tembaga (LME)	\$13,507/mt	+4.78%	+41.74%	+3.20%

Minyak Mentah

Harga Brent April 2026 tercatat USD 107,54/barel, tumbuh 67,48% (YoY) dan 61,06% (YtD). Koreksi sedikit terjadi dikarenakan perkiraan Selat Hormuz yang mulai dibuka Kembali pada akhir Mei hingga Juni 2026

Gas Bumi

Harga gas alam Eropa (TTF) Mei 2026 tercatat USD 16,17/MMBtu, tumbuh 38,68% (YoY) dan 37,50% (YtD). Tekanan harga TTF terus berlanjut imbas dari Cadangan gas Eropa yang baru terisi 38%

Tembaga

Harga tembaga LME Mei 2026 tercatat USD 13.507/mt, tumbuh 41,74% (YoY) dan 3,20% (YtD). Peningkatan harga ditopang permintaan struktural dari transisi energi dan ekspansi data center AI, yang menyerap 60% permintaan tembaga global.

Nikel

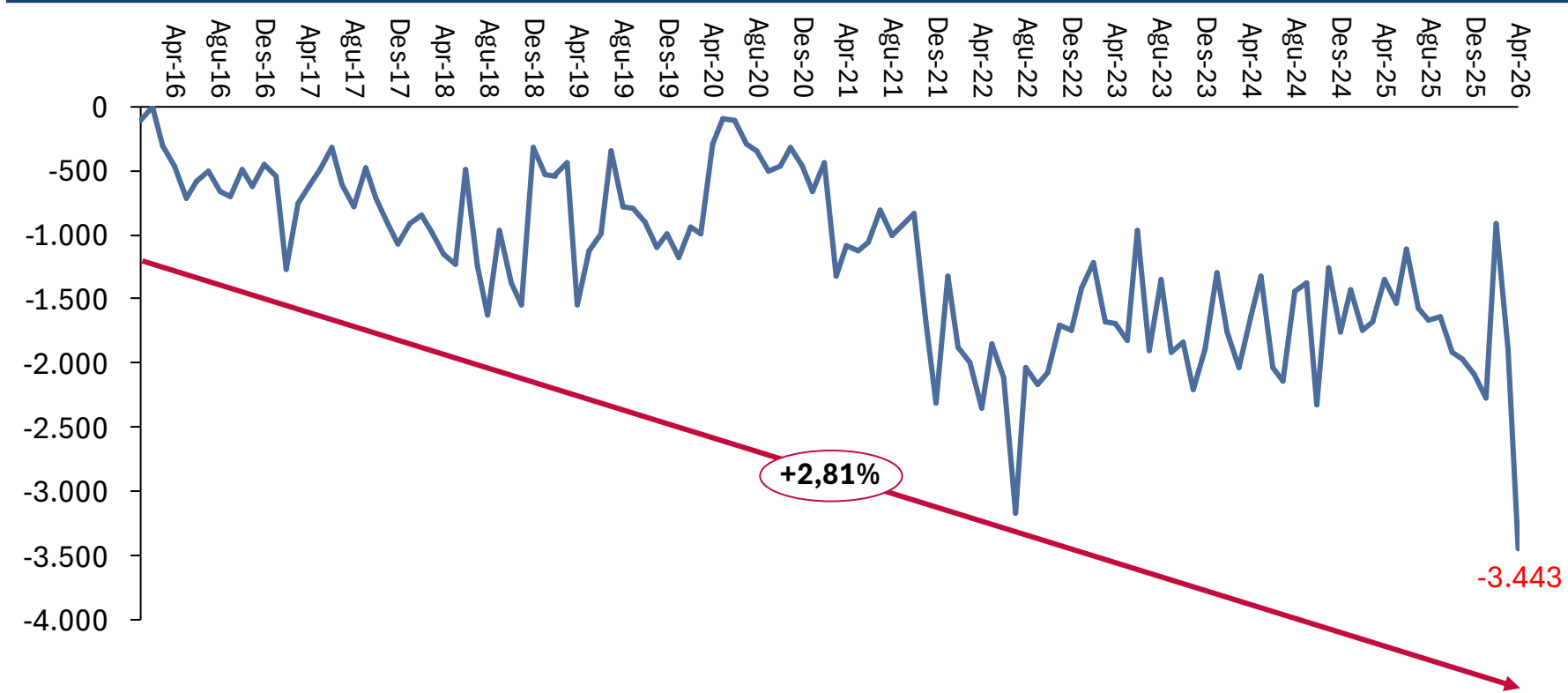
Harga nikel LME Mei 2026 tercatat USD 18.805/mt, tumbuh 22,50% (YoY) dan 5,39% (YtD). Harga sempat menyentuh USD 20.000/mt, didorong oleh kekhawatiran pasokan akibat dari Kebijakan pembatasan kuota tambang Indonesia

Emas

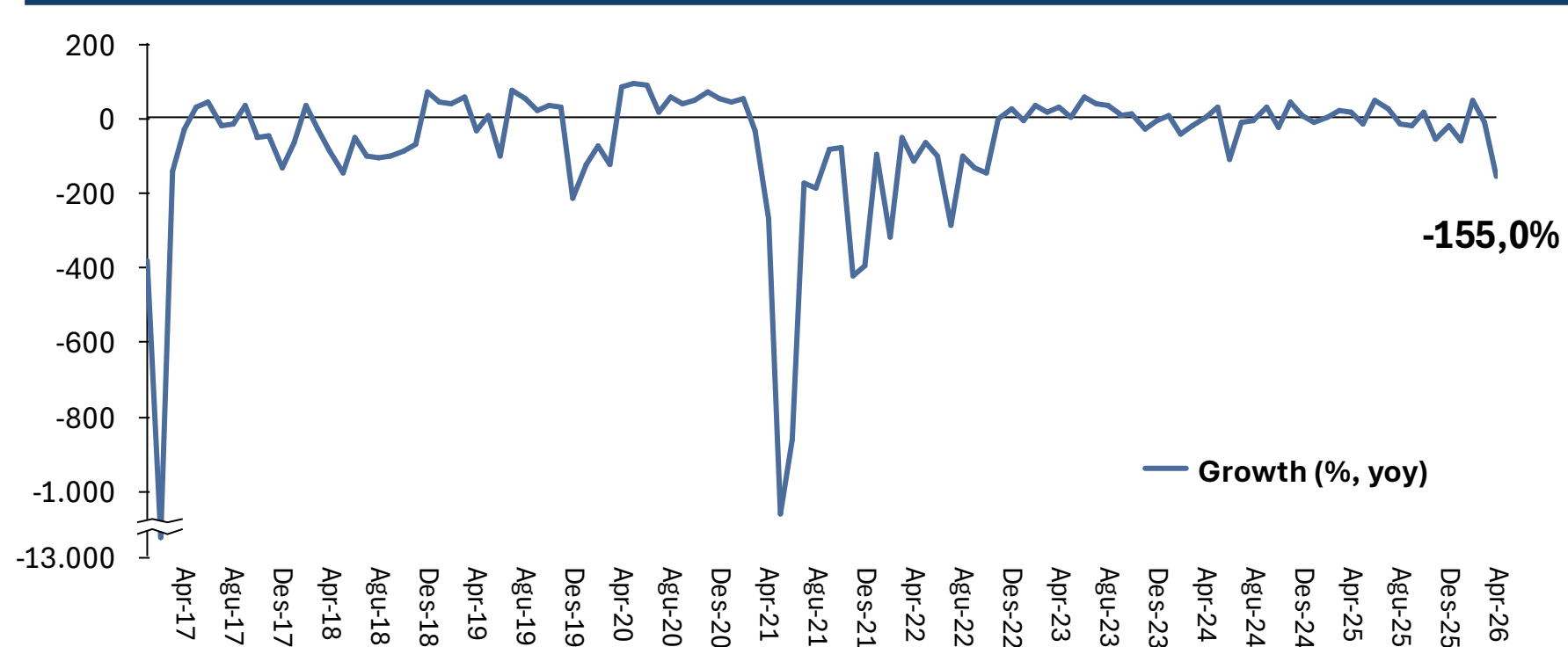
Harga emas London Mei 2026 tercatat USD 4.587,21/troy oz, masih tumbuh 38,61% (YoY) namun terkoreksi -3,48% (YtD). Harga terus terkoreksi, dipicu oleh penguatan dolar AS dan naiknya imbal hasil US Treasury setelah data inflasi AS diumumkan

Sektor Migas sebagai Penggerak Surplus Perdagangan Indonesia

Neraca Perdagangan Minyak dan Gas, 2016-2026 (USD Juta)



Pertumbuhan Neraca Perdagangan Minyak dan Gas, 2016-2025 (% , yoy)



- Secara kumulatif Januari-April 2026 neraca perdagangan Indonesia mencatatkan surplus senilai US\$ 89,1 miliar, lebih rendah dibandingkan dengan periode yang sama di 2025 yang mencapai US\$ 3,32 miliar,
- Sektor migas menjadi sumber menyusutnya surplus nasional dengan mencatatkan defisit sebesar US\$ 3,44 miliar pada April 2026.
- Defisit Migas pada April 2026 menjadi level terendah dalam satu dekade terakhir (2016–2026) yang secara struktural terus memburuk.
- Secara pertumbuhan, defisit migas semakin merosot tajam hingga -155,0% per April 2026 (yoy).
- Berdasarkan rilis BPS, membengkaknya defisit migas didorong oleh tiga komponen utama, yaitu perdagangan minyak mentah (*crude oil*), hasil minyak (BBM) dan gas alam.
- Secara kumulatif, dalam empat bulan pertama tahun 2026, sektor migas mencatatkan defisit sebesar US\$ 8,52 miliar. Lonjakan defisit energi ini perlu dikelola secara serius, terutama dengan memitigasi tingginya ketergantungan impor hasil minyak dan minyak mentah.

Kebijakan Ekspor Satu Pintu: Respons atas Kebocoran Devisa Komoditas SDA

Latar Belakang Kebijakan Ekspor Satu Pintu Komoditas SDA



Under-Invoicing

Nilai ekspor yang dilaporkan lebih rendah dibanding nilai aktual yang dikirim

Royalti dan penerimaan pajak mengecil



Transfer Pricing

Nilai laba dialihkan ke Perusahaan "cangkang" ke luar negeri dengan pajak yang lebih rendah

Indonesia kehilangan potensi penerimaan pajak



Pelarian Devisa Hasil Ekspor (DHE)

DHE Perusahaan Indonesia ditempatkan di rekening luar negeri

Menekan stabilitas nilai rupiah

Presiden Prabowo menyoroti praktik *under invoicing* sebagai penyebab kebocoran kekayaan nasional, dalam 34 tahun diperkirakan nilai *under invoicing* mencapai:

Rp 15.400 triliun*

PT Danantara Sumberdaya Indonesia (DSI)

Sebagai eksportir tunggal untuk tiga komoditas utama



Batu Bara



Kelapa Sawit



Paduan Besi (Ferroalloy)

Tujuan Pembentukan PT DSI

1

Memastikan Devisa Hasil Ekspor (DHE) kembali masuk sepenuhnya ke sistem keuangan domestik

2

Memberantas praktik *underinvoicing* dan *transfer pricing* pada ekspor komoditas SDA

3

Meningkatkan transparansi transaksi pada volume, harga, dan mekanisme pengiriman tercatat secara akurat

4

Penerimaan negara dari royalti, pajak ekspor, dan bea keluar

5

Memperkuat posisi tawar Indonesia di pasar komoditas global

Peta Jalan Implementasi & Tahapan Operasional PT DSI

Tahap I: Masa Transisi Monitoring (1 Juni - 31 Desember 2026)



Aturan Main:

- Eksportir eksisting tetap beroperasi normal dan memegang kontrak langsung dengan pembeli.
- Wajib mendaftarkan PT DSI sebagai *co-exporter* di sistem **CEISA 4.0**.
- Dokumen ekspor (PEB), izin lartas, dan pembayaran (Bea Keluar/PNBP) tetap atas nama perusahaan pribadi, namun wajib dilaporkan ke PT DSI.

Mekanisme Evaluasi:

3 bulan pertama (Juni–Agustus 2026) menjadi masa evaluasi kritis. Jika lolos, masuk ke skema hibrida "**Perusahaan QQ BUMN Ekspor**" sebelum akhir tahun.

Tahap II: Sentralisasi Penuh ((Mulai 1 Januari 2027))



Aturan Main:

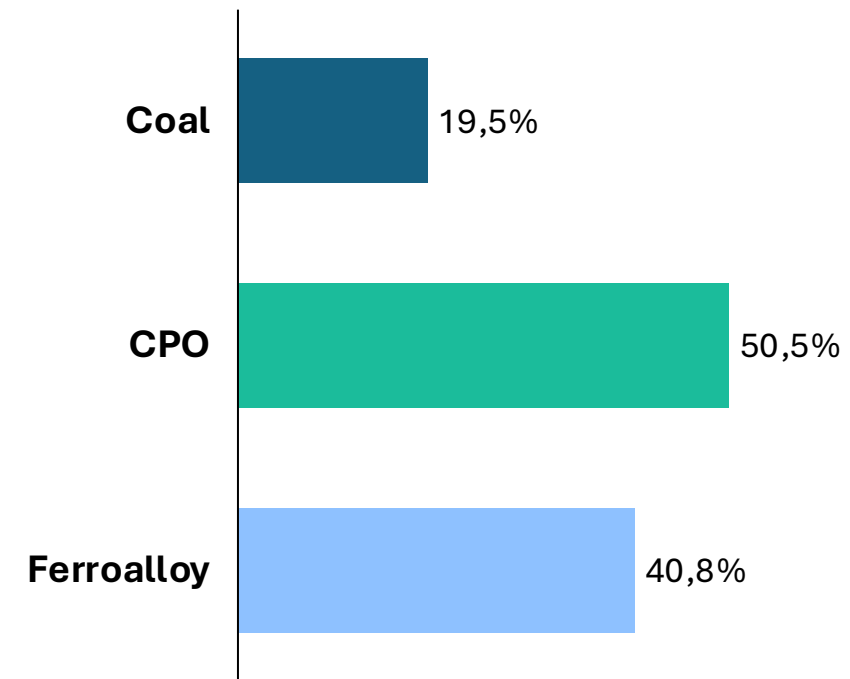
- PT DSI mengambil alih kendali 100% komoditas strategis (Batubara, CPO, Ferroalloy).
- Seluruh proses kontrak, transaksi keuangan, pabean (*customs clearance*), hingga logistik pengapalan diurus sepenuhnya oleh PT DSI.
- Nasib Kontrak Lama → Pemerintah tetap menghormati (*honor*) kontrak berjalan, HANYA JIKA harganya wajar (*not underpriced*).

Landasan Hukum Baru:

Pemberlakuan PP No. 21/2026 (Kewajiban repatriasi 100% DHE dengan masa penahanan/pengendapan 12 bulan untuk negara tanpa perjanjian dagang formal).

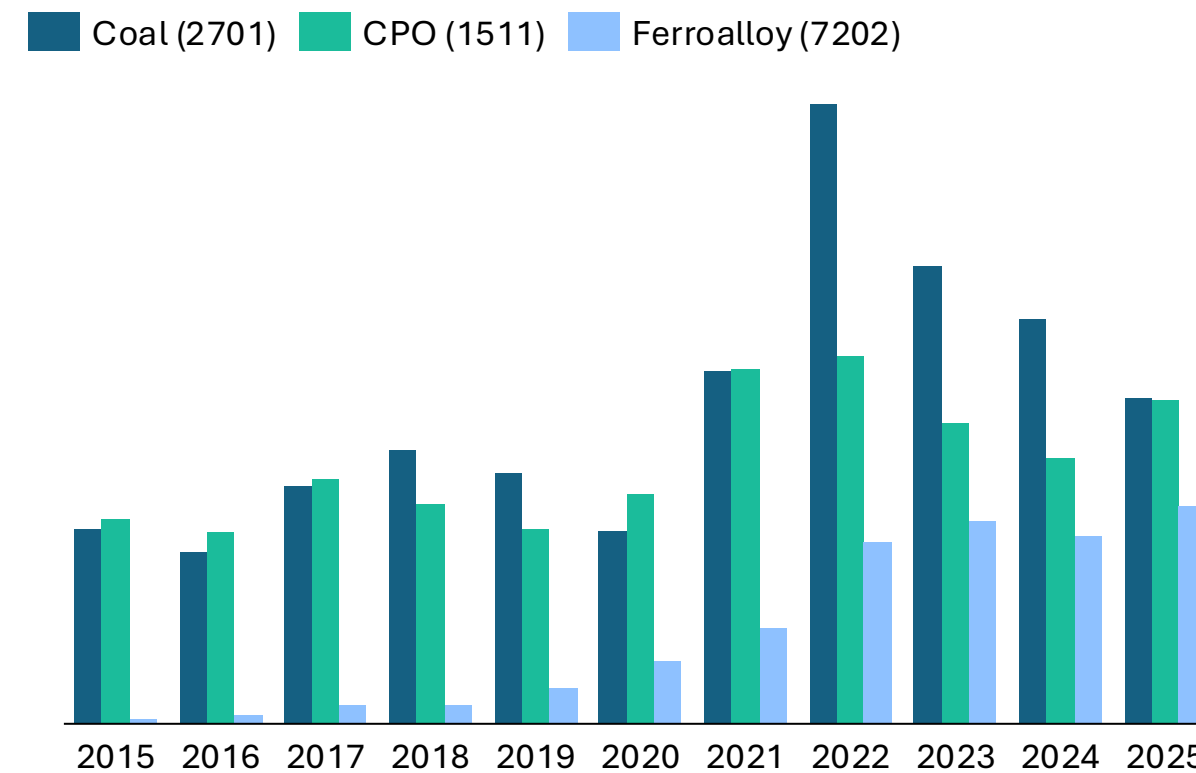
Kinerja Eksisting & Market Share 3 Komoditas Utama Ekspor Tunggal

Market Share Global 3 Komoditas Utama, 2024 Persen (%)



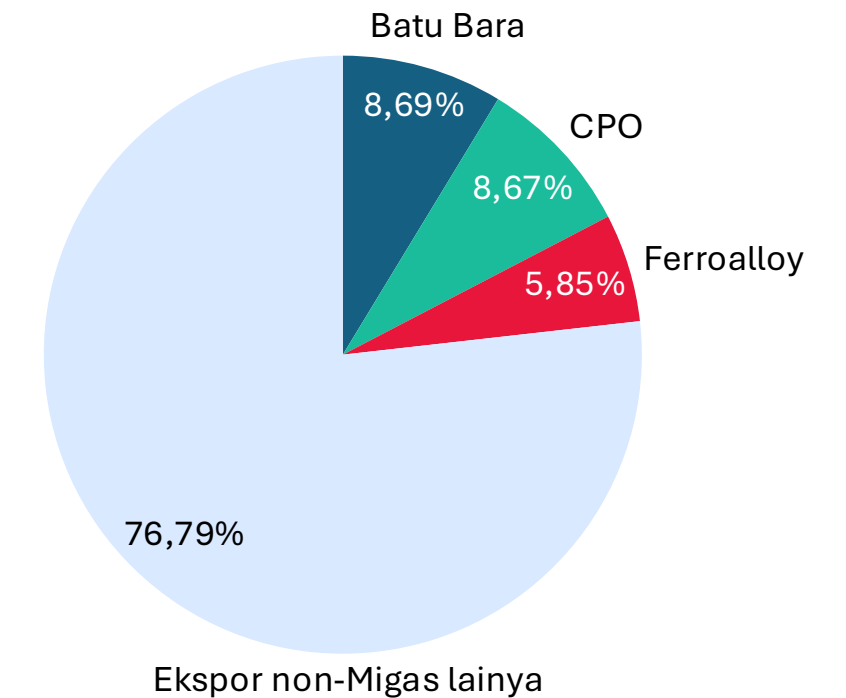
Indonesia mendominasi pasar global untuk ketiga komoditas prioritas PT DSI, menguasai lebih dari separuh ekspor CPO dunia, dan lebih dari sepertiga ferroalloy global.

Tren Nilai Ekspor 3 Komoditas Utama, 2014-2024 Miliar USD



Nilai ekspor ketiga komoditas tumbuh konsisten, dengan Ferroalloy mencatat pertumbuhan 47x lipat dalam satu dekade.

Pangsa Ekspor Non-Migas 2025 Persen (%)



Ketiga komoditas utama tersebut menyumbang 23,21% dari seluruh ekspor non-migas Indonesia pada 2025.

Memahami *Trade Misinvoicing* dan Metode Pengukurannya

Definisi Trade Misinvoicing

Praktik manipulasi nilai dalam dokumen perdagangan internasional, di mana nilai ekspor atau impor sengaja dibuat tidak sesuai dengan transaksi yang terjadi.

Dua Bentuk Umum

Under-Invoicing

- Nilai ekspor dilaporkan lebih rendah dari yang sebenarnya.
- Selisih yang tidak dilaporkan menyebabkan devisa negara hilang dan pajak ekspor yang seharusnya dibayar menjadi lebih kecil dari yang seharusnya.

Over-Invoicing

- Nilai ekspor dilaporkan lebih tinggi dari yang sebenarnya.
- Kelebihan ini mengindikasikan adanya pengalihan keuntungan atau rekayasa transaksi lintas negeri.

Besar misinvoicing dihitung menggunakan metode *Gross Excluding Reversals* (GER) dari *Global Financial Integrity* dengan membandingkan nilai ekspor yang dilaporkan Indonesia dengan nilai impor yang dilaporkan negara mitra dalam komoditas dan periode yang sama.

Rumus Perhitungan:

$$K = [X_a - \frac{M_b}{\beta}] + [\frac{M_b}{\beta} - X_a]$$

Keterangan:

- K = Total Misinvoicing
- M = Nilai Impor Mitra
- X = Nilai Ekspor RI
- β^* = Faktor penyesuaian biaya pengapalan dan Asuransi (Faktor CIF/FOB)

*factor β = 1,10 mengacu pada UNCTAD (2016) dan Marur (2019)

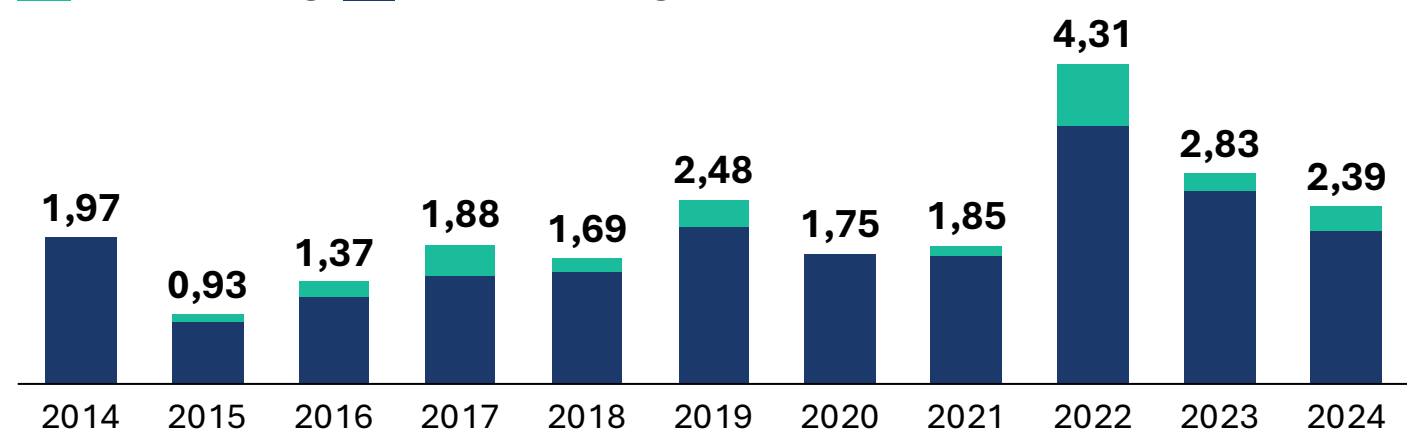
Batubara: Sumber Kebocoran Devisa dari Praktik Under-Invoicing Ekspor

Total *Misinvoicing* Batu Bara Indonesia, 2014-2024

Miliar USD

Total 2014-2024 = USD 23,46 miliar

Over Invoicing Under Invoicing

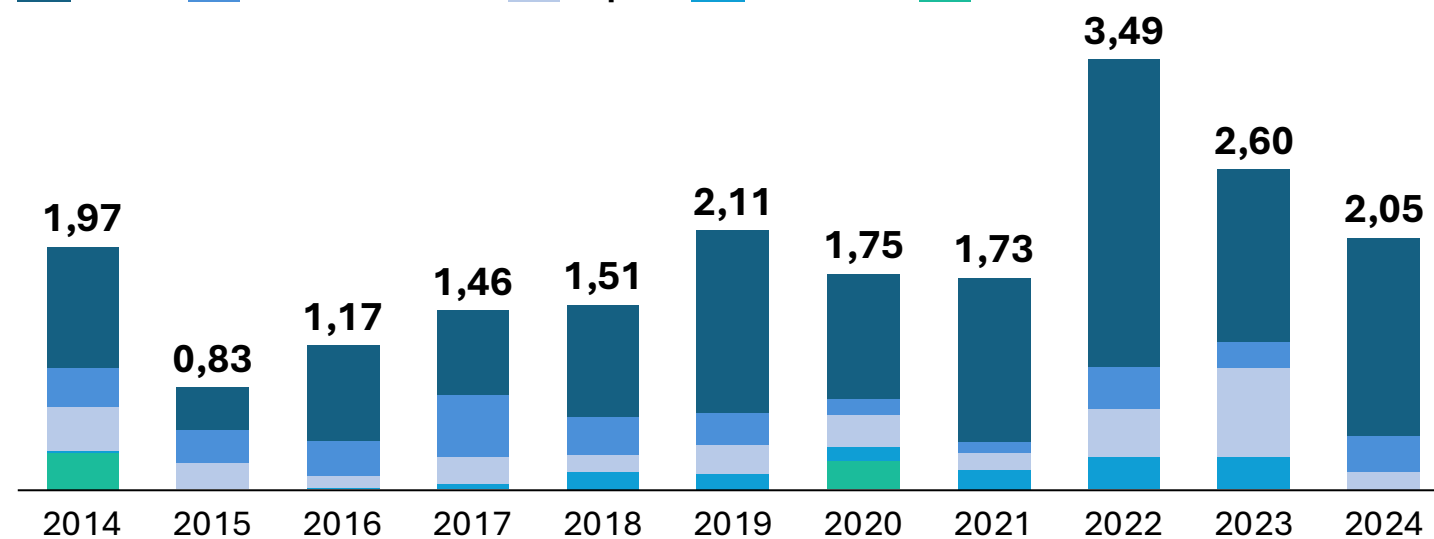


Total *Misinvoicing* batubara melonjak tajam di 2022 mencapai \$4,31 miliar, bertepatan dengan lonjakan harga komoditas global pasca invasi Rusia ke Ukraina.

Kontribusi *Under-Invoicing* per negara mitra, 2014-2024

Miliar USD

India Korea Selatan Japan Vietnam China



India menyumbang *Under-invoicing* terbesar sebesar 63,2% dari total

2014-2024

\$20,7 Miliar

Nilai *Under-Invoicing*

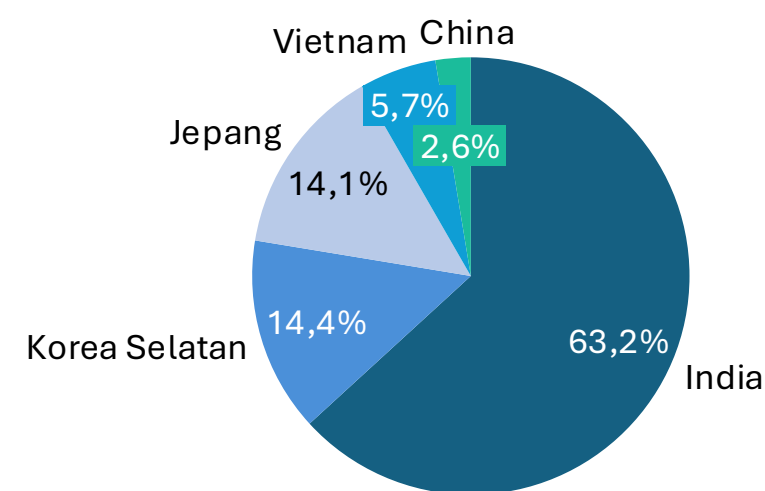
\$2,8 Miliar

Nilai *Over-Invoicing*

\$23,5 Miliar

Total *Misinvoicing*

Share *Under Invoicing* per negara mitra, 2014-2024 (%)



- Batu Bara menjadi komoditas utama dengan nilai *misinvoicing* terbesar dibandingkan komoditas lainya dengan nilai total \$23,5 miliar selama periode 2014-2024/
- Misinvoicing* didominasi praktik *under-invoicing* sebesar \$20,7 miliar atau 88% dari total *misinvoicing*.
- Artinya terdapat potensi kehilangan penerimaan negara akibat praktik *under-invoicing* sebesar Rp291,87 T.
- Praktik *misinvoicing* bersifat sensitif terhadap harga. Artinya, semakin tinggi harga komoditas, semakin besar potensi untuk memanipulasi nilai ekspor.

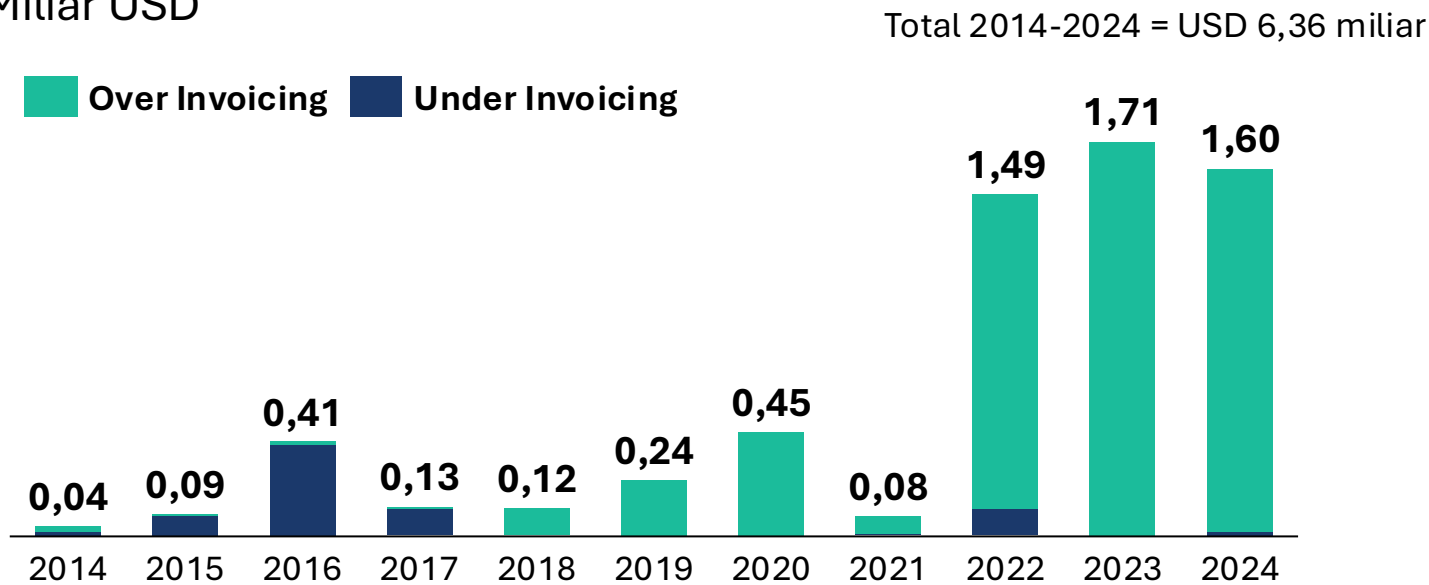
[1] Sumber: UN Comtrade 2026)

[2] Nota: Kalkulasi menggunakan metode Green Excluding Revenue (GER). Global Financial Integrity. Negara mitra: India, Jepang, Korea Selatan, Vietnam, China. Batas: CIF/FOB: 1, 10

Pola Misinvoicing Ferroalloy yang Konsisten dan Terstruktur

Total *Misinvoicing* Ferroalloy Indonesia, 2014-2024

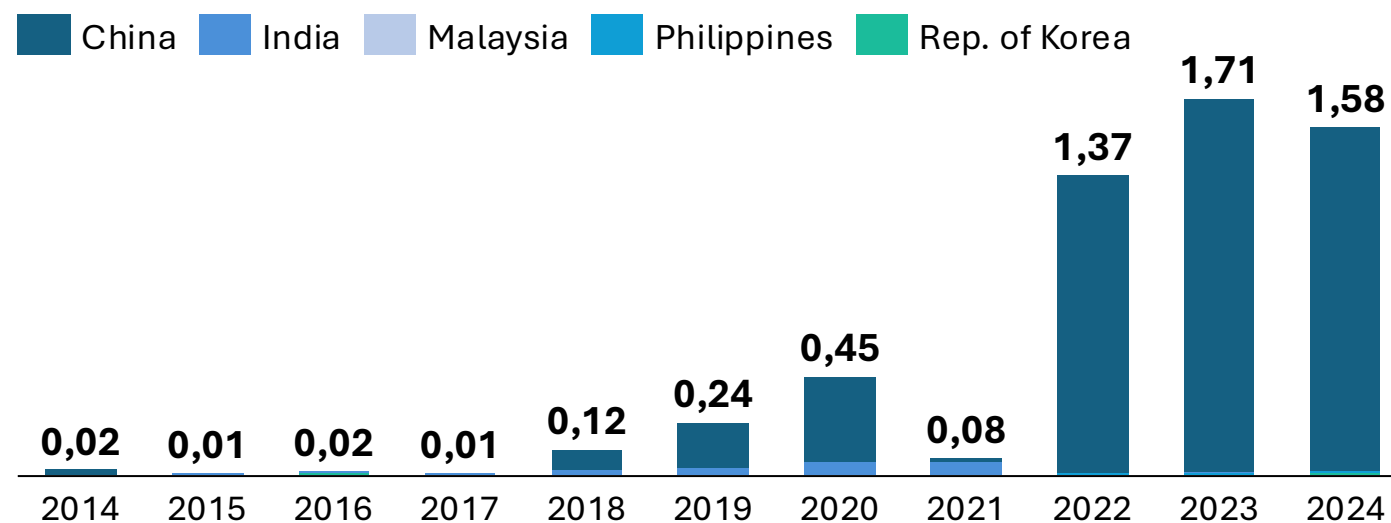
Miliar USD



Total misinvoicing ferroalloy melonjak, seiring dengan meningkatnya pertumbuhan ekspor ferroalloy.

Kontribusi Over- Invoicing per negara mitra, 2014-2024

Miliar USD



Nilai *over-invoicing* ferroalloy Indonesia dominan mengalir ke satu negara, yaitu China

2014-2024

\$0,76 Miliar

Nilai *Under-Invoicing*

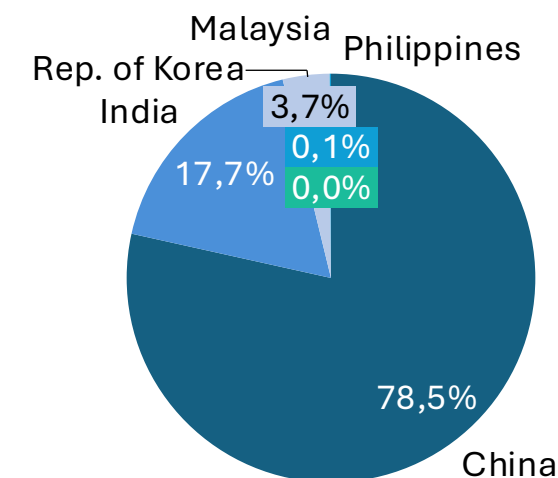
\$5,60 Miliar

Nilai *Over-Invoicing*

\$6,36 Miliar

Total *Misinvoicing*

Share Over-Invoicing per negara mitra, 2014-2024 (%)

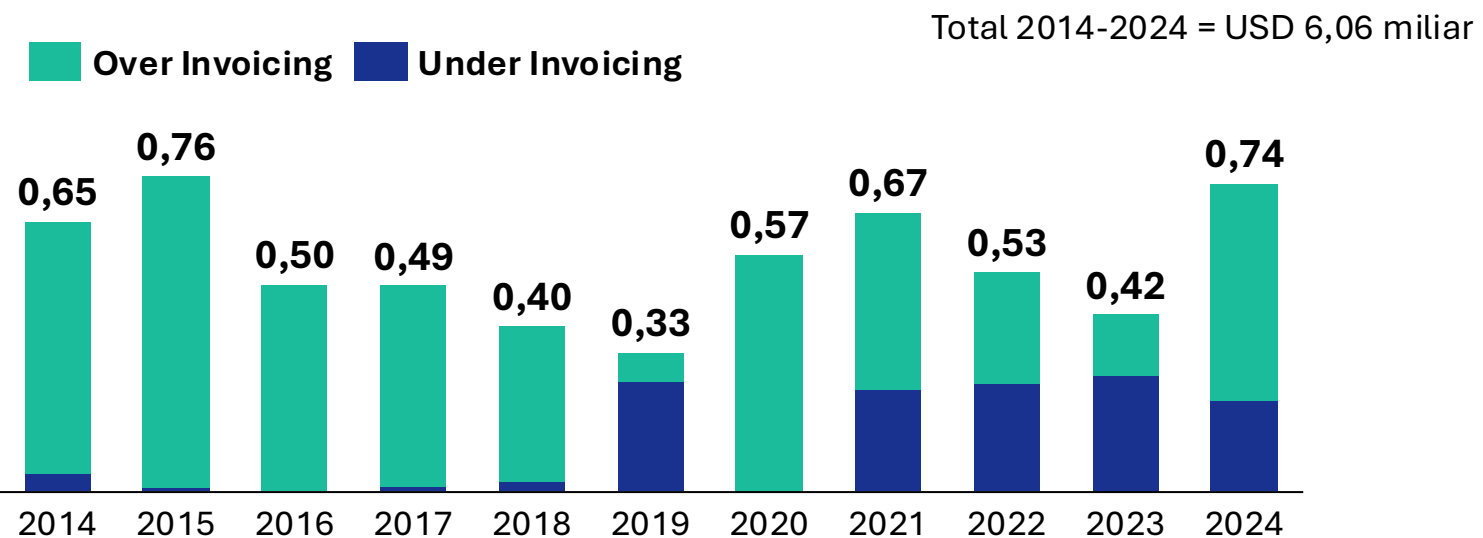


- Misinvoicing ferroalloy Indonesia didominasi oleh over-invoicing dengan nilai mencapai \$5,60 miliar atau 88% dari total misinvoicing \$6,36 miliar selama 2014-2024.
- Dominasi over-invoicing mengindikasikan adanya rekayasa transaksi lintas negara yang berpotensi memfasilitasi pengalihan keuntungan ke luar negeri.
- Over-invoicing ferroalloy terkonsentrasi ke satu negara yaitu China yang menyumbang 78,5% dari total over-invoicing ferroalloy, menjadikan pola ini bersifat bilateral dan terstruktur.

Pola Misinvoicing CPO yang Meluas ke Seluruh Negara Mitra Utama

Total Misinvoicing CPO Indonesia, 2014-2024

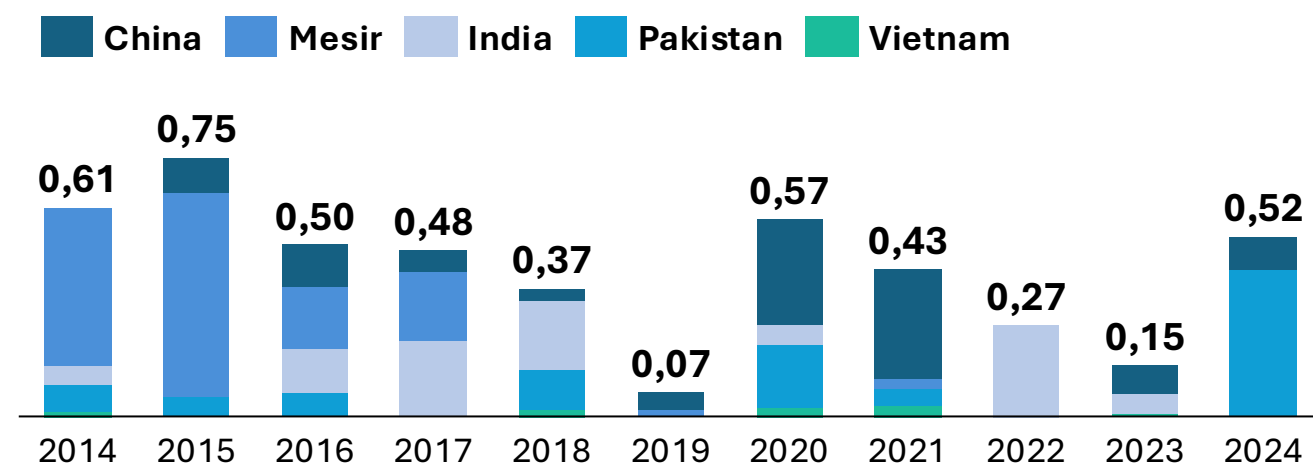
Miliar USD



Total *misinvoicing* CPO lebih didominasi oleh *over-invoicing*, sebesar \$4,71 Miliar dolar.

Kontribusi Over-Invoicing per negara mitra, 2014-2024

Miliar USD



Mesir menjadi tujuan *over-invoicing* terbesar, menyumbang hampir sepertiga dari total *over-invoicing* CPO Indonesia

2014-2024

\$1,35 Miliar

Nilai *Under-Invoicing*

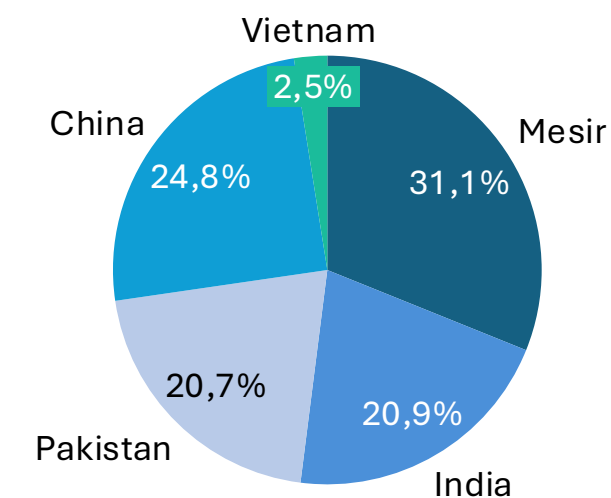
\$4,71 Miliar

Nilai *Over-Invoicing*

\$6,06 Miliar

Total *Misinvoicing*

Share Over-Invoicing per negara mitra, 2014-2024 (%)



- *Misinvoicing* CPO Indonesia didominasi oleh *over-invoicing*, senilai USD 4,71 Miliar, atau 77,8% dari total *misinvoicing* \$6,06 miliar selama 2014-2024.
- Nilai *over-invoicing* mengindikasikan adanya manipulasi nilai ekspor, berpotensi digunakan sebagai pengalihan keuntungan atau celah masuknya dana gelap ke dalam negeri.
- *Over-invoicing* CPO tidak terkonsentrasi di satu negara, tersebar merata ke empat mitra utama, mengindikasikan pola yang lebih sistemik.

[1] Sumber: UN Comtrade 2026)

[2] Notes: Kalkulasi menggunakan metode Gross Excluding Reversals (GER). Global Financial Integrity. HS Code: 1511. Negara mitra: China, India, Pakistan, Mesir, Vietnam. Beta CIF/FOB: 1.10

Dampak Trade Misinvoicing ke Devisa dan Penerimaan Negara

Selama satu dekade, praktik misinvoicing pada ekspor Batubara, CPO dan ferroalloy mengakibatkan hilangnya devisa dan potensi penerimaan negara dalam jumlah yang besar

\$22,8 Miliar

Estimasi devisa ekspor yang tidak masuk sistem keuangan Indonesia, 2014-2024

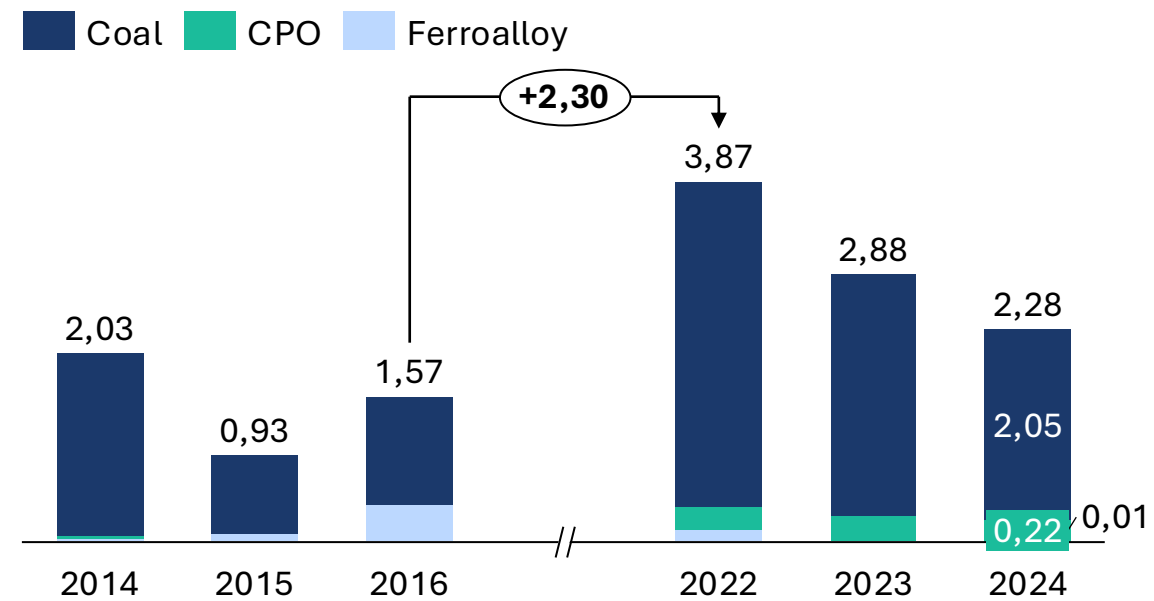
\$1,2 Miliar

Estimasi Pajak Royalti yang hilang, 2014-2024

90.7%

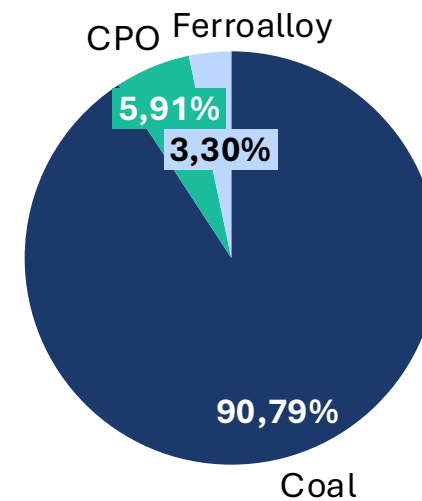
dari total devisa hilang berasal dari ekspor batubara

Tren Kerugian Devisa Ekspor per Komoditas, 2014–2024
USD Billion



Kebocoran Devisa melonjak dua kali lipat pada 2022 imbas dari harga komoditas global yang meningkat

Share Kerugian Devisa per Komoditas, 2014–2024
% dari total



9 dari 10 devisa yang hilang berasal dari komoditas Batubara

Komoditas	Devisa Hilang	Estimasi Pajak Hilang
Coal	Rp 291,4 Triliun	Rp 8.7 T - 20.4 Triliun
CPO	Rp 19 Triliun	Rp 1.0 - 2.9 Triliun
Ferroalloy	Rp 10.7 Triliun	Rp 0 Triliun - Rp0,3 Triliun
Total	Rp 321.1 Triliun	Rp 9.7 – 23,6 Triliun

- Batubara menjadi sumber utama kebocoran devisa ekspor Indonesia, sebesar 90,7% atau Rp291,1 triliun dari total ketiga komoditas utama.
- Negara **berpotensi** kehilangan dari pajak dan royalti yang tidak terpungut dalam rentang sebesar **Rp 9.7 - 23,6 Triliun**.

[1] Sumber: UN Comtrade, diolah (2026)

[2] Notes: Estimasi devisa hilang dihitung dari total under-invoicing ketiga komoditas; Estimasi potensi pajak/royalti hilang dihitung dengan mengalikan nilai under-invoicing dengan tarif skenario per komoditas

Global Benchmarks: Tiga Model Tata Kelola Ekspor Komoditas

Monopoli Vertikal



Kasus: Maroko, Qatar, Kuwait, Arab Saudi, Rusia (Minyak dan Fosfat)

- BUMN mengontrol seluruh rantai produksi (mulai dari ekstraksi, pemrosesan hingga ekspor).
- Tidak ada pembelian dari pihak ketiga, komoditas yang diproduksi memang milik negara.

Rusia (Gazprom)

Migas & Batubara

Gazprom memegang monopoli ekspor gas pipa secara legal via Federal Law on Gas Export (Juli 2006). Kontrol negara melalui kepemilikan mayoritas BUMN menciptakan monopoli vertikal de facto.

Sanksi Barat 2022 memperlihatkan fragilitas model ketergantungan buyer tunggal pada eksportir negara.

Relevansi dengan DSI:

Tidak relevan langsung: DSI tidak memproduksi komoditas., membeli dari produsen swasta.

Monopsoni Ekspor



Kasus: Ghana Cocoa Board (COCOBOD) (Cocoa)

- Satu-satunya pembeli sah dari petani.
- Menetapkan harga beli per musim.
- Bertanggung jawab atas ekspor seluruh kakao Ghana.

Kasus: Australia (AWB) & Kanada (CWB)

Gandum (Model Serupa, Kemudian Dideregulasi)

AWB Australia: single-desk monopoli gandum dihapus 1 Juli 2008 via Wheat Export Marketing Act 2008, setelah skandal pembayaran kickback USD 220 juta ke rezim Saddam Hussein via program Oil-for-Food PBB.

CWB Kanada: single-desk powers dihapus 1 Agustus 2012 via Marketing Freedom for Grain Producers Act. CWB berlanjut sebagai perusahaan komersial biasa, dijual ke konsorsium asing 2015.

Relevansi dengan DSI:

Relevan untuk Fase 2 DSI. Kasus AWB & CWB menjadi pelajaran agar model monopoli ekspor (pembelian dari swasta) memperkuat tata kelola untuk mencegah korupsi.

Badan Lisensi



Kasus: Malaysia Palm Oil Board, Kementerian Perindustrian dan Perdagangan Vietnam (CPO dan Beras)

- Menerbitkan lisensi ekspor dan mengumpulkan data pelaporan.
- Bukan pembeli tunggal (produsen tetap bisa menjual ke pihak lain).

Kasus: China (Rare Earth dan Logam Strategis)

Lisensi dan Kuota Ekspor (Versi yang Jauh Lebih Agresif)

China tidak membeli rare earth dari produsen untuk diekspor, negara mengendalikan akses ekspor via kuota dan pajak. Serupa MPOB secara fungsi, namun dengan instrumen leverage geopolitik.

2010: kuota dipangkas 40%, disertai embargo informal ke Jepang (insiden Senkaku). WTO memutuskan China melanggar aturan (2014); kuota akhirnya dicabut 2015.

Relevansi dengan DSI:

Serupa dengan Fase 1 DSI dengan peran pengawasan tanpa intervensi harga langsung.

Pelajaran dari COCOBOD: Apa yang Harus Dijaga DSI Agar Tidak Terjadi Penyimpangan

Salah Kelola Kontrak Forward



USD 1,3 M

Kerugian COCOBOD 2023/24

Pada periode 2023-2024, COCOBOD mengontrak 786.672 ton kakao untuk dijual forward pada harga USD 2.661/ton, namun produksi aktual hanya 432.145 ton (meleset 45% dari proyeksi). Sehingga sebanyak 333.767 ton di-rollover ke musim berikutnya dan menghasilkan kerugian pendapatan USD 1,3 miliar karena harga pasar telah melonjak ke USD 6.600/ton.

Penyelundupan Meluas



160 rb ton

Kakao diselundupkan (2023/24)

Diperkirakan 160.000 ton kakao diselundupkan keluar Ghana ke Ivory Coast, Togo, dan Burkina Faso pada periode 2023-2024 lebih dari tiga kali lipat dibanding musim sebelumnya.

Korupsi dan Audit yang Gagal



GH¢ 32,5 M

Utang COCOBOD 2025

Audit Service menemukan irregularitas pengadaan senilai miliaran GHC dalam operasi COCOBOD 2017-2024. Berdasarkan hasil investasi juga disebutkan terjadi korupsi pengadaan. Utang lembaga mencapai GH¢ 32,5 miliar pada awal 2025.

Pelajaran untuk DSI

DSI harus membatasi penjualan berjangka (forward) pada persentase produksi yang terverifikasi, bukan berdasarkan proyeksi optimis saja. Manajemen kontrak forward membutuhkan keterlibatan ahli komoditas berpengalaman.

Struktur monopsoni tidak dengan sendirinya mengeliminasi potensi penyelundupan bahkan dalam banyak kasus justru bisa memicu penyelundupan. Oleh karena itu, harga pembelian DSI harus ditetapkan pada tingkat yang cukup kompetitif, dan fungsi pengawasan bea cukai harus dijaga independensinya dari DSI.

Tanpa mekanisme audit eksternal yang kuat dan terpisah dari struktur DSI, lembaga ini berisiko menjadi instrumen rente untuk itu penting untuk memastikan transparansi pelaporan dan rotasi pejabat.

Kendati DSI berbeda dari COCOBOD karena tidak menetapkan harga beli tetap per musim dan perdagangan domestik tetap diperbolehkan. Namun risiko seperti mis-manajemen kontrak, harga tidak kompetitif, celah pengawasan berlaku di kedua lembaga tersebut.

Dampak Positif vs Risiko: DSI sebagai Eksportir Tunggal Komoditas

Dampak Positif

Pemulihan Devisa dari Bocoran Ekspor

Selama 2014-2024, praktik under-invoicing, transfer pricing, dan pelarian DHE di tiga komoditas diestimasi merugikan negara hingga USD 22,8 miliar. Konsolidasi ekspor melalui DSI sebagai entitas tunggal memungkinkan verifikasi harga dan volume secara terpusat.

Penguatan Posisi Tawar Harga

Indonesia menguasai pangsa signifikan ekspor batubara termal global. Sebagai eksportir tunggal, DSI dapat menghindari persaingan harga antar perusahaan swasta yang selama ini melemahkan posisi tawar Indonesia terhadap buyer internasional.

Dukungan terhadap Stabilitas Nilai Tukar

Kewajiban repatriasi DHE yang lebih ketat dan termonitor melalui satu entitas akan memperkuat pasokan valas domestik, mendukung stabilitas rupiah khususnya di tengah tekanan eksternal seperti yang terjadi hingga Juni 2026.

Transparansi dan Audit Data Komoditas

Pemusatan data ekspor memungkinkan pemerintah mengaudit volume, harga, dan tujuan ekspor secara real-time. Ini menutup celah opasitas yang selama ini dimanfaatkan untuk manipulasi dokumen PEB dan penghindaran DHE.

Koordinasi Kebijakan Hilirisasi

Dengan DSI sebagai pintu ekspor, pemerintah dapat lebih optimal mendorong pengelolaan ekspor raw material dengan kewajiban peningkatan nilai tambah domestik dengan memperkuat agenda hilirisasi batubara, CPO, dan ferroalloy.

Risiko & Tantangan

Titik Kegagalan Tunggal dalam Rantai Ekspor

Gangguan operasional, sengketa hukum, atau kegagalan likuiditas DSI dapat menghentikan ekspor batubara, CPO, dan ferroalloy secara serentak, risiko ini tidak ada dalam sistem ekspor terdistribusi.

Disrupsi Kontrak dan Hubungan Dagang Eksisting

Kontrak jangka panjang antara eksportir swasta dan buyer internasional berada di luar DSI. Transisi paksa memicu risiko wanprestasi kontrak dan arbitrase internasional.

Risiko Peralihan Pasokan oleh Buyer Global

Buyer memiliki opsi alternatif dari Australia, Kolombia, Malaysia, dan Afrika Selatan. Premium harga atau proses birokrasi DSI yang tidak efisien akan mendorong buyer mendiversifikasi sumber pasokan.

Ketiadaan Mekanisme Koreksi Pasar

Tanpa persaingan antar eksportir sebagai price discovery, DSI rentan menetapkan harga yang tidak mencerminkan pasar global sehingga berpotensi merugikan produsen domestik maupun menurunkan daya saing ekspor nasional.

Potensi Rent-Seeking dan Moral Hazard Institusional

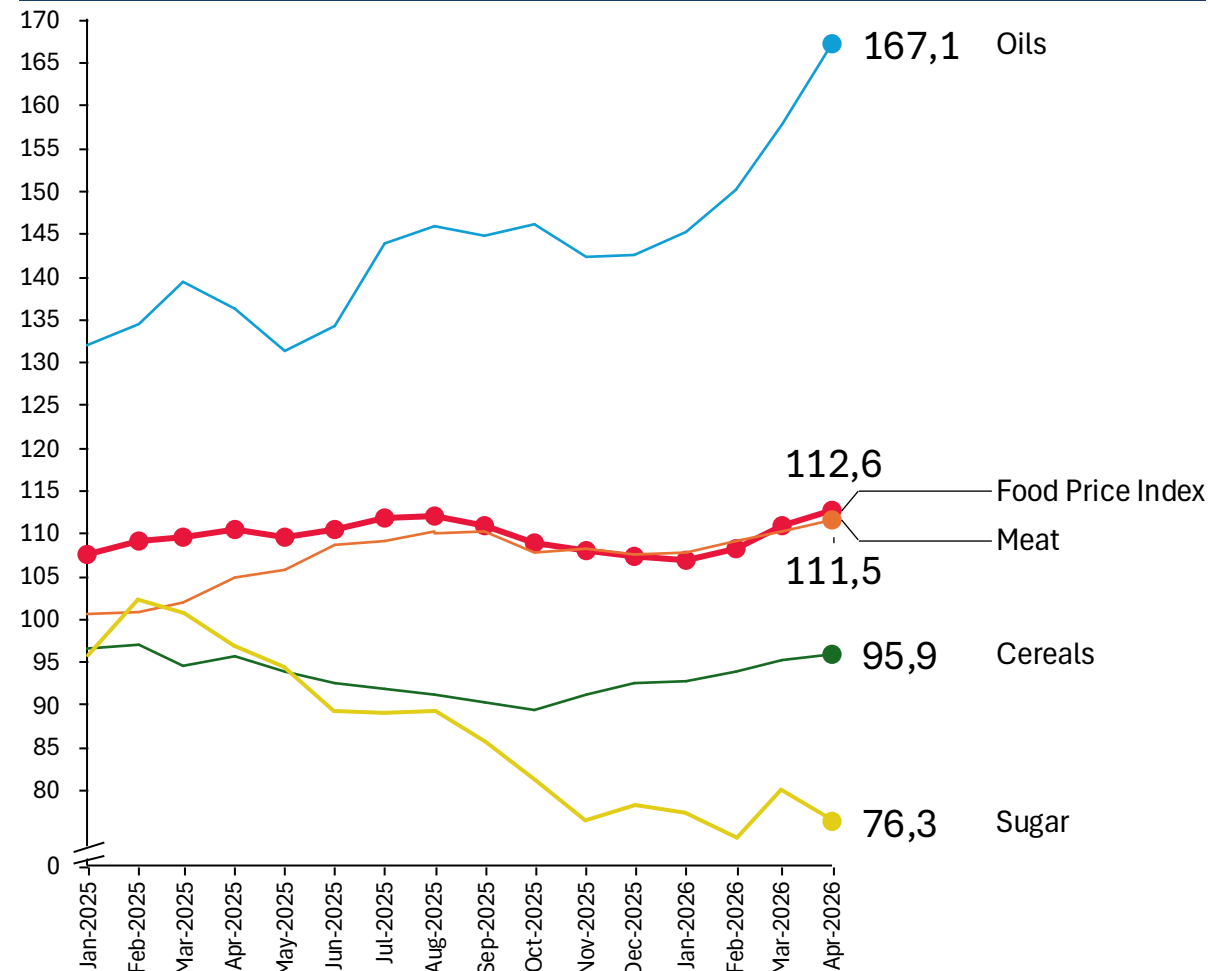
Monopoli ekspor tanpa memperkuat audit eksternal independen rentan menimbulkan instrumen rente.

Update Sektor Pangan

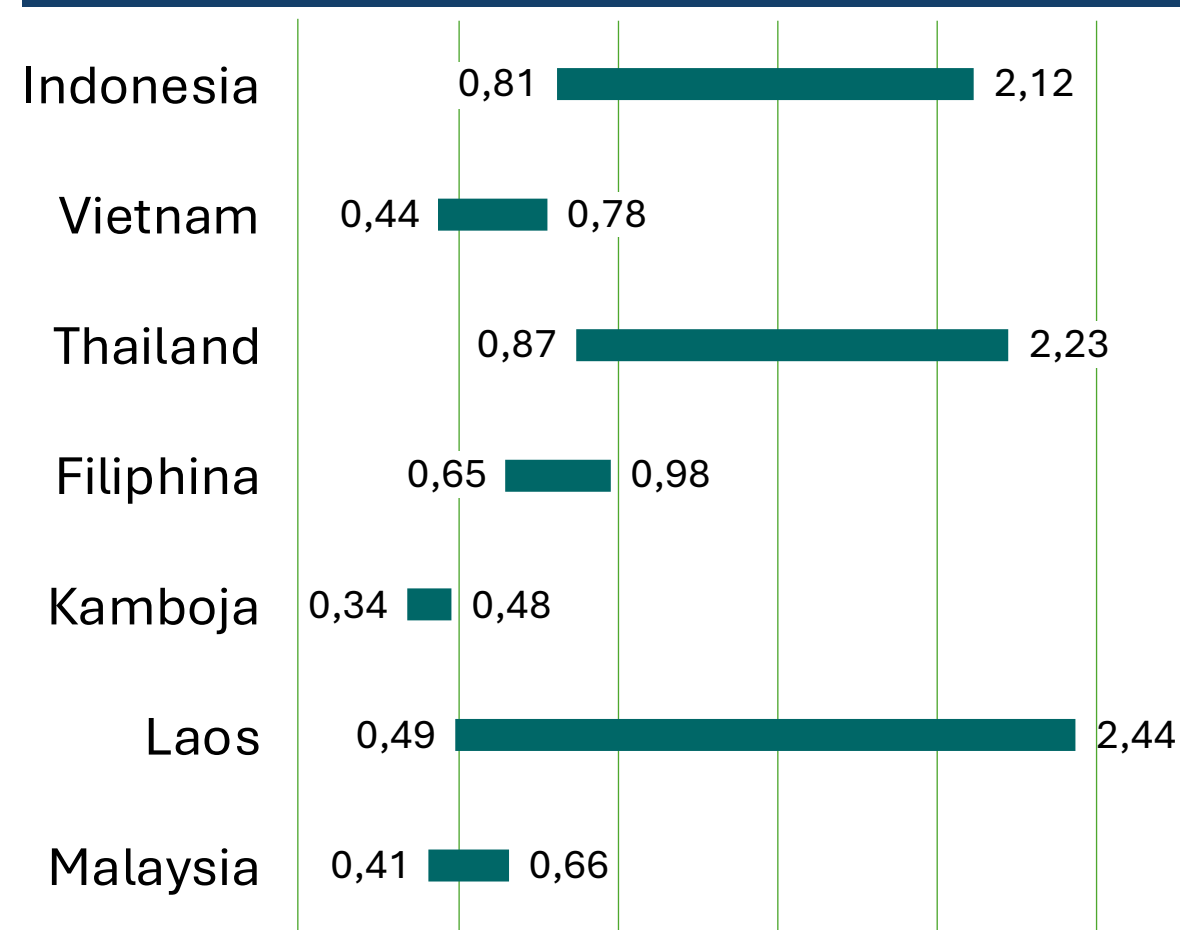


Tekanan Harga Beras Dunia: Beras Indonesia Tergolong Mahal?

FAO Food Prices Index (Jan 2025 - Apr 2026)



Komparasi Rentang Harga Beras Mei 2026 (US\$/Kg)

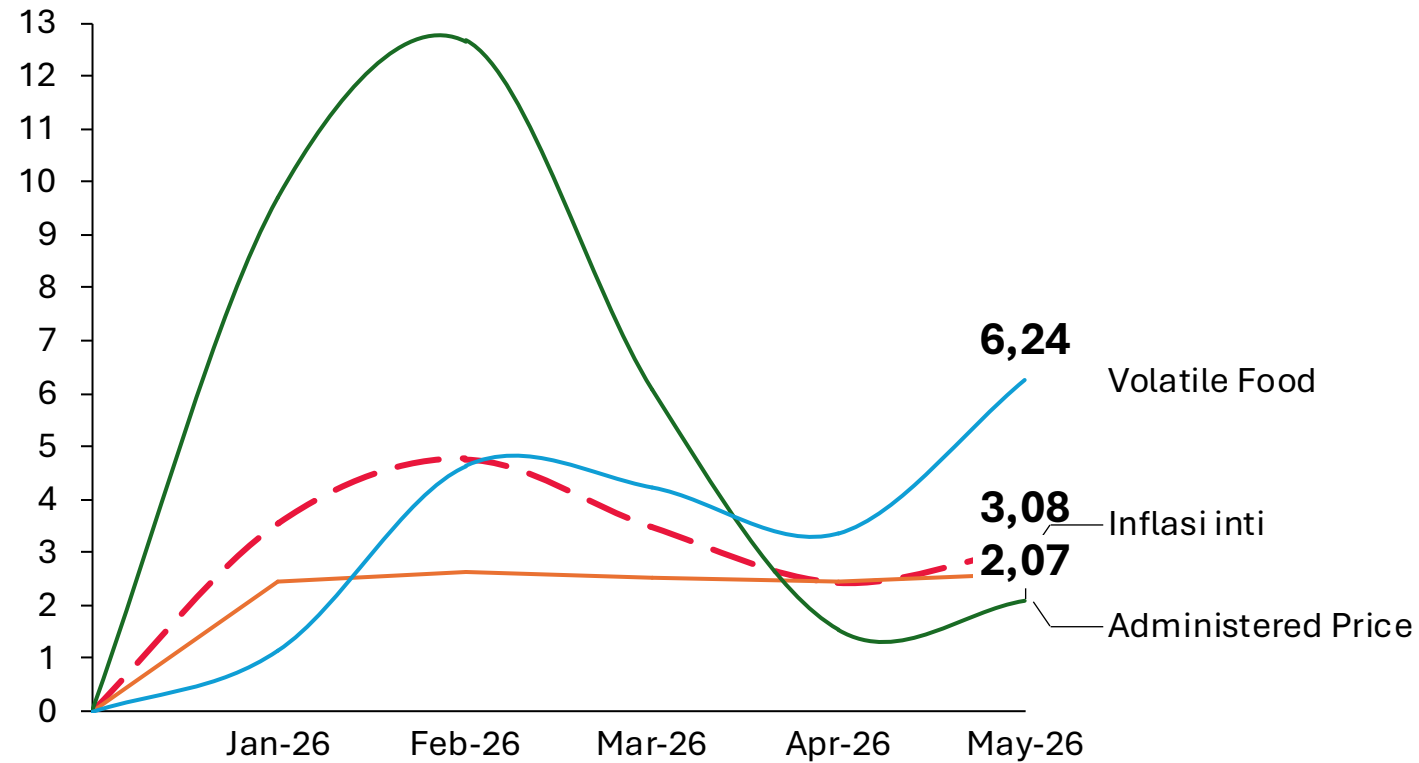


- Indeks harga minyak nabati melonjak tajam hingga menyentuh angka 167,1, jauh melampaui rata-rata indeks pangan global (112,6) dan kategori komoditas lainnya.
- Sedangkan, minyak sawit turun tipis (-0,52% MoM), namun masih mencatat kenaikan signifikan secara tahunan (+25,55% YoY), menunjukkan tren *bullish* jangka panjang masih bertahan.
- Kenaikan harga gula dipicu defisit pasar global dan kebijakan negara produsen seperti Brasil yang mengalihkan tebu untuk etanol.
- Secara tahunan (%YoY), gandum mengalami kenaikan harga paling signifikan sebesar 36,92%, mencerminkan tekanan pasokan sereal yang sangat berat. Kenaikan harga gandum berpotensi mempertegas risiko ketergantungan Indonesia pada impor gandum, yang dapat memperbesar eksposur terhadap inflasi impor dan volatilitas harga pangan domestik.
- Terdapat disparitas harga beras yang sangat besar di Asia Tenggara, di mana harga tertinggi di Laos (2,44 USD/kg), Thailand (2,23 USD/kg), dan Indonesia (2,12 USD/kg).
- Tren kenaikan harga pangan ini merupakan dampak dari meroketnya biaya pupuk dan energi yang membebani sektor pertanian global.

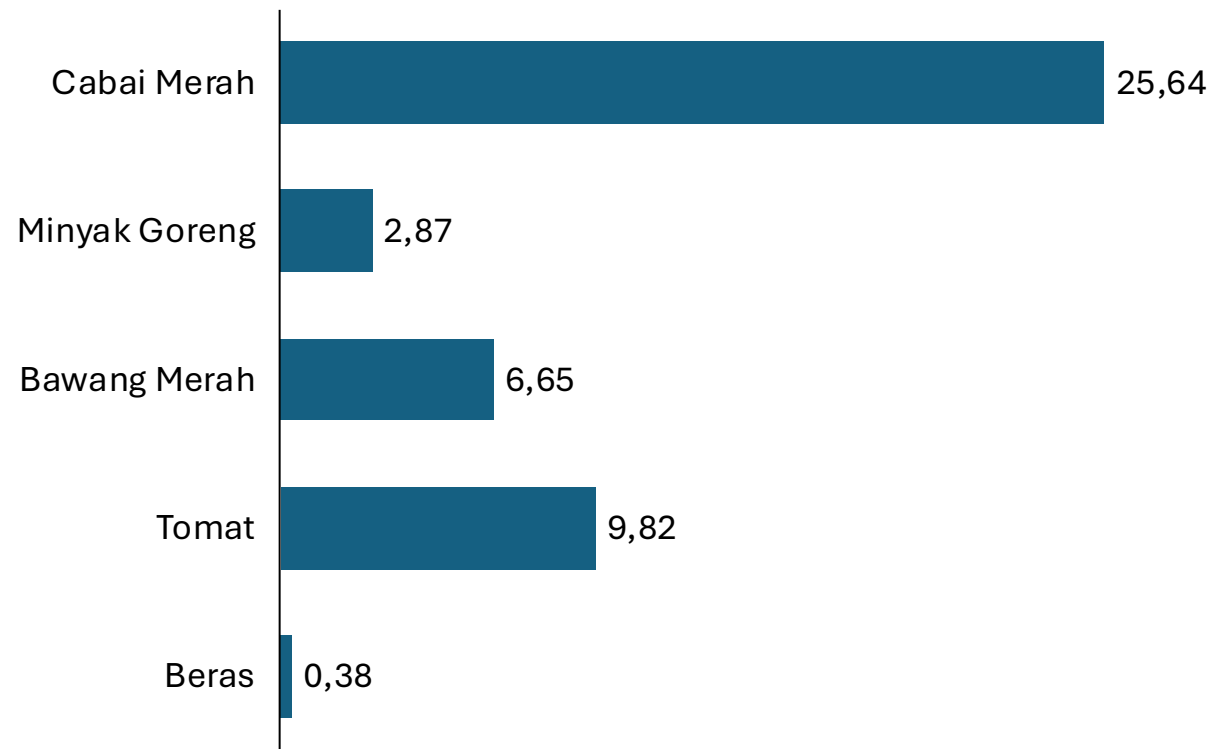
Komoditas	Harga Mei 2026	%, MoM	%, YoY	%, YtD (Jan-Mei 2026)
Minyak Sawit	\$1140/mt	-0.52	+25.55	+13.43
Gula, World	\$0.34/kg	+6.25	-12.82	+6.25
Gandum, U.S., HRW)	\$303/mt	+7.45	+36.92	+21.25
Jagung	\$216.2/mt	+1.03	+6.03	+5.72
Kedelai	\$474/mt	+2.38	+14.49	+11.53
Beras, Thailand 25%	\$435/mt	+9.02	+4.57	+8.21

Inflasi dan Ketahanan Pangan Selama Idul Adha 2026

Pergerakan Inflasi *Volatile Food* (% M-to-M)



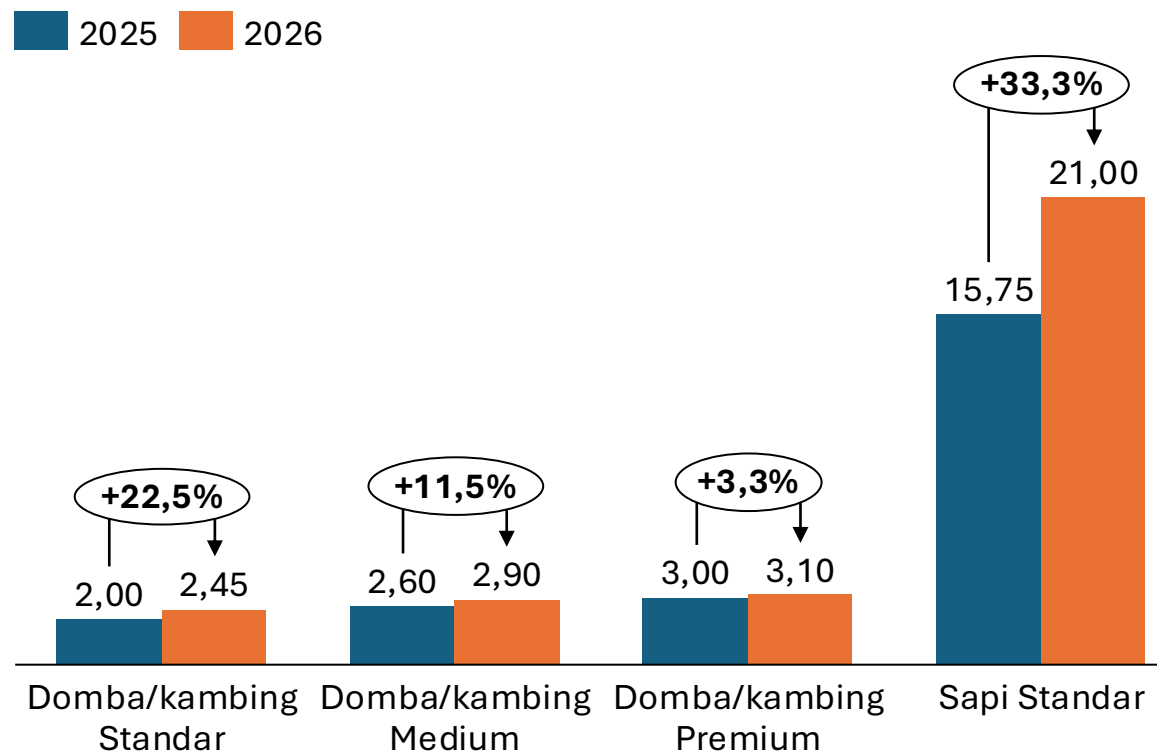
Inflasi Kelompok Makanan, Minuman, dan Tembakau (% M-to-M)



- Kenaikan harga pangan terutama cabai disebabkan oleh gagal panen yang dipicu oleh cuaca ekstrem sehingga tanaman membusuk atau terserang penyakit.
- Disisi lain, kenaikan harga minyak goreng disebabkan kenaikan harga bahan baku plastik akibat gangguan pasokan nafta di tengah konflik geopolitik Timur Tengah.
- Adapun kenaikan harga hewan kurban didorong oleh masalah distribusi dan logistik mencakup kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM), tarif akomodasi, hingga pelemahan Rupiah yang turut memberikan tekanan tidak langsung melalui mahalnya harga pakan ternak.
- Pasar murah dan operasi pasar efektif sebagai instrumen stabilisasi jangka pendek untuk meredam gejolak harga pangan dan menjaga daya beli masyarakat rentan, terutama pada periode peningkatan permintaan musiman seperti Idul Adha. Namun, pengendalian inflasi pangan yang berkelanjutan memerlukan pembenahan struktural melalui penguatan produksi, stok pangan, distribusi, logistik, dan sistem pemantauan harga agar stabilitas pasokan dan harga dapat terjaga secara jangka panjang.

Komoditas	Harga per 26 Mei 2026	% MoM	% YtD (Jan-Mei 2026)	% YoY
Beras	16.000	0.63	1.59	4.58
Daging Sapi	147.950	1.96	6.17	8.27
Daging Ayam	39.450	-6.96	-5.17	14.35
Telur Ayam	30.550	-8.12	-6.72	1.66
Bawang Merah	50.650	6.18	0	13.44
Bawang Putih	38.850	-4.07	-3.36	-16.27
Cabai Merah	68.450	45.79	39.27	17.01
Gula Pasir	19.550	0.51	3.44	1.30
Minyak Goreng	22.800	4.35	7.80	8.31
Cabai Rawit	69.100	-5.02	4.54	14.98

Perbandingan Harga Hewan Kurban 2025 dan 2026 (Rp Juta)



Peran Militer dalam Agenda Swasembada Pangan

Landasan Hukum & Regulasi

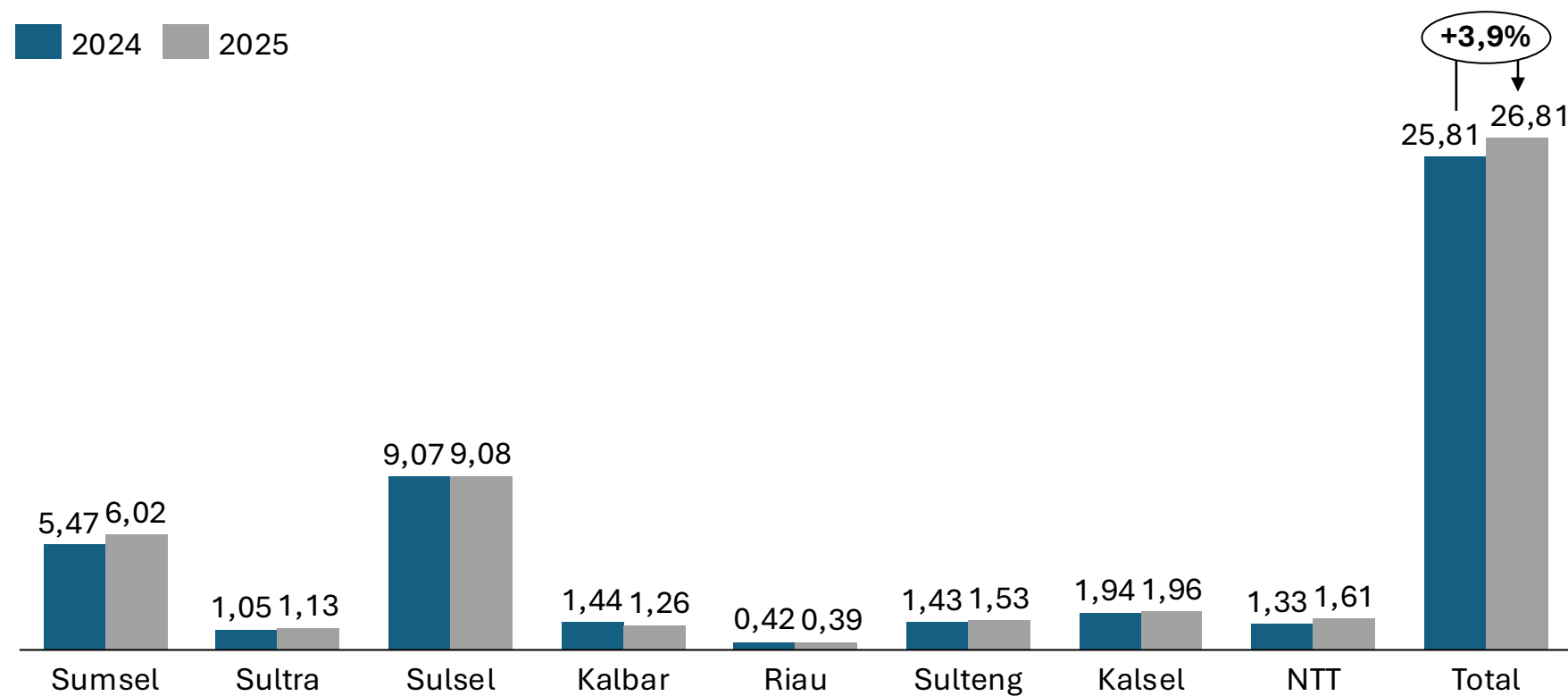
- **UU No 34 Tahun 2004**; TNI berperan melindungi keselamatan bangsa, termasuk dalam aspek non-militer seperti ketahanan pangan
- **UU Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara**
- **Kerjasama Menteri Pertanian TNI AD melalui Kostrad**

19 provinsi prioritas terpilih sebagai lokasi fokus program kerjasama Kementerian Pertanian (Kementan) dan TNI AD untuk percepatan swasembada pangan 2025–2026, diantaranya untuk program:

	Target	Realisasi
Cetak Sawah Baru	480.000 ha (2026)	171.874 ha (per November'25)
Optimalisasi Lahan Rawa	500.000 ha	Kalbar : 88.30% Muaro Jambi : 88.56%
Pompanisasi	1.000.000	>30.000 pemasangan

Kontribusi Hasil Produksi Padi 19 Provinsi Prioritas terhadap Produksi Nasional (Persen)

2024 2025

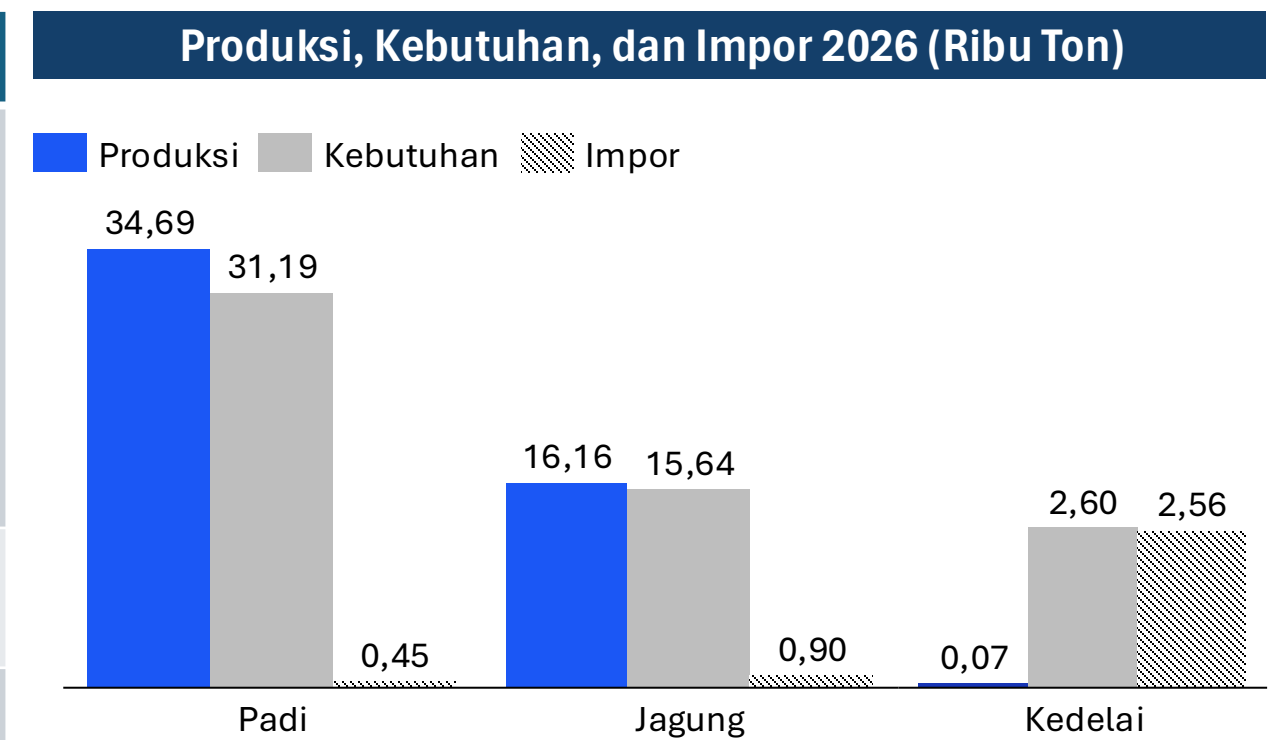


- Produksi padi masih bergantung di Pulau Jawa. Sebagian besar provinsi prioritas memiliki kontribusi di bawah **2%** terhadap produksi nasional.
- Beberapa Provinsi mengalami peningkatan kontribusi seperti Sumatera Selatan, NTT dan Kalimantan Selatan. Namun terdapat provinsi yang justru mengalami penurunan (Kalbar dan Riau)

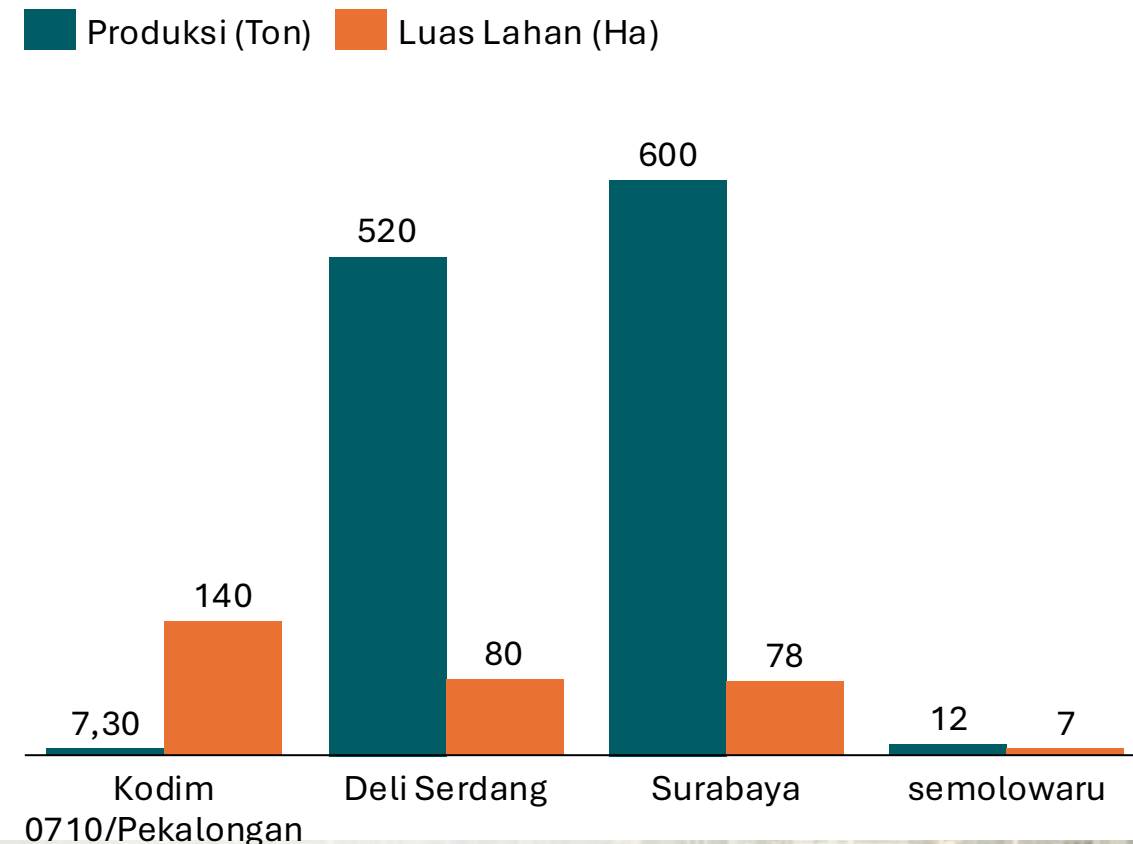
Tahun	Pembukaan Lahan	Realisasi Dibuka
Soeharto (1995 – 1998)	1 Juta ha	3.000 ha
SBY (2008-2014)	<ul style="list-style-type: none"> • Proyek MIFEE mencapai 1,28 juta Ha (Merauke, Papua) • 298.000 ha (Bulungan, Kalimantan Utara) • 100.000 ha (Ketapang, Kalimantan Barat) 	<ul style="list-style-type: none"> • Proyek MIFEE :100 ha • Ketapang :1.000 ha
Jokowi (2015-2024)	<ul style="list-style-type: none"> • 1,2 juta ha (Merauke, Papua) • 10.000 ha (Keerom, Papua) • 31.000 ha (Gunung Mas, Kalimantan Tengah) 	<ul style="list-style-type: none"> • Kalteng : 30.000 ha • Sumut : 215 ha
Prabowo (2025-2026)	480.000 ha (2026)	171.874 ha (2025)

Dukungan TNI dalam Swasembada Padi, Jagung, dan Kedelai

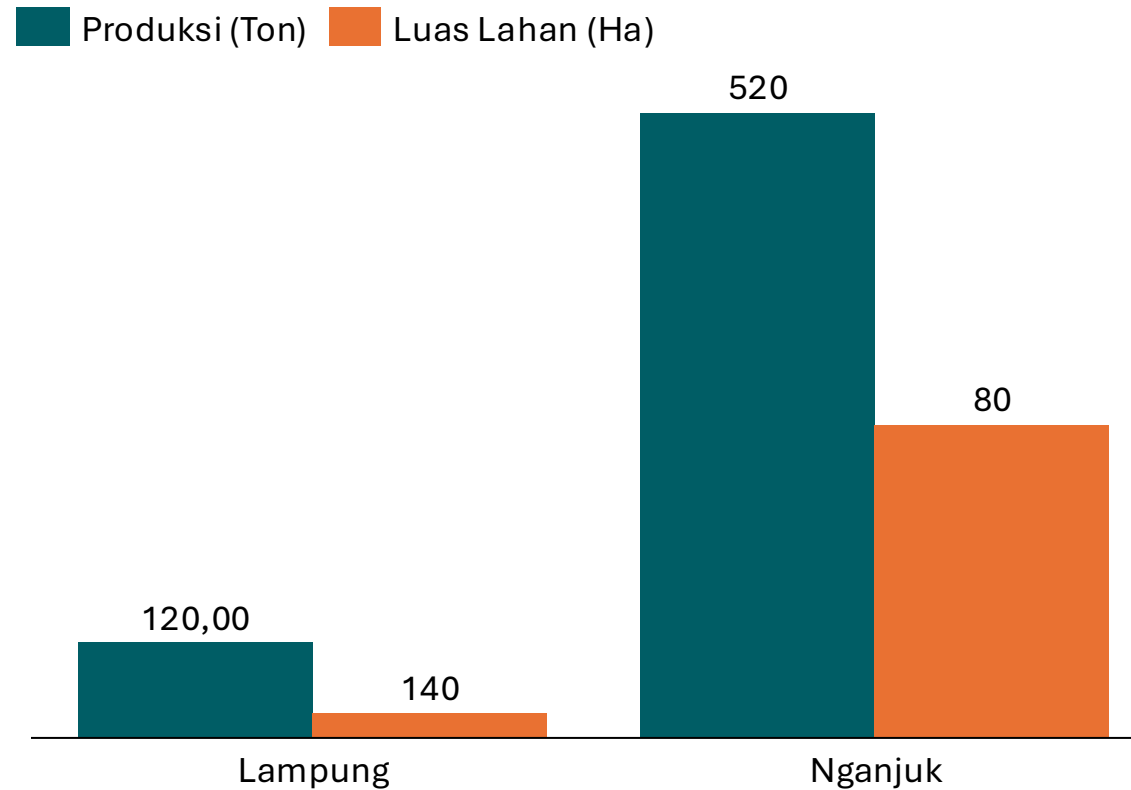
Kategori	Orde Baru	Jokowi	Prabowo
Landasan	MPRS No. XXIV/MPRS/1966 dan UU No. 20 Tahun 1982	<ul style="list-style-type: none"> UU No. 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia, khususnya Pasal 7 ayat (2) angka 9 Nota Kesepahaman (MoU) antara Kementerian Pertanian dan TNI AD 2015 	<ul style="list-style-type: none"> Ketahanan Pangan sebagai Pertahanan Negara
Operasional	Mobilisasi Massa & Penyuluhan	Infrastruktur & Pendampingan GAPOKTAN	Mekanisasi, Pompanisasi, & Pemanfaatan Lahan
Pola Pendekatan	Top-Down & Pengawasan Ketat	Kolaboratif & Sukarela	Akselerasi Teknis & Penguatan Logistik



Swasembada Padi TNI AD 2025



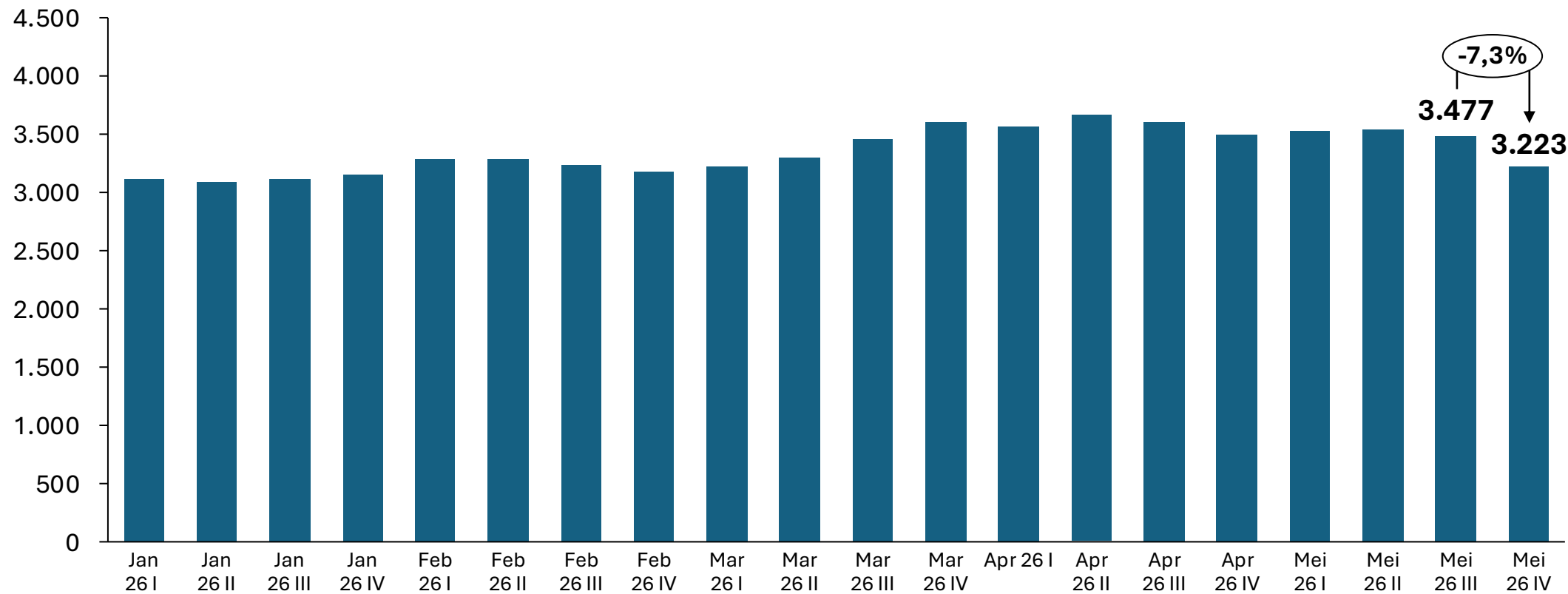
Swasembada Kedelai TNI AL 2025



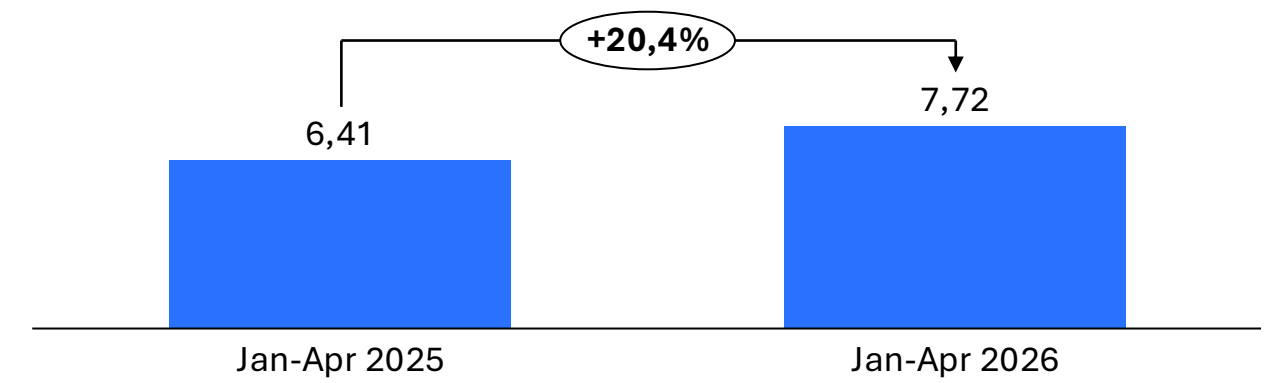
- Berbeda dengan era Jokowi sebelumnya yang fokus pada infrastruktur dasar, pola pendekatan saat ini menekankan pada mekanisasi, pompanisasi, dan pemanfaatan lahan guna mempercepat kemandirian pangan di tengah tantangan iklim
- TNI AD ditugaskan fokus pada komoditas padi dan jagung, sedangkan TNI AL bertanggung jawab meningkatkan produksi kedelai
- Perlu menjadi perhatian El Niño ditahun ini yang membuat kemarau panjang sehingga penurunan curah hujan dan ketersediaan air irigasi menjadi tantangan produksi pangan.
- Pencapaian target swasembada padi 2026 sangat bergantung pada disiplin militer di lapangan daripada penguatan institusi pertanian sipil yang tergerus oleh beralihnya minat generasi muda ke sektor industri

Dampak Sentimen DSI: Harga TBS Turun di tengah Lonjakan Harga CPO Global

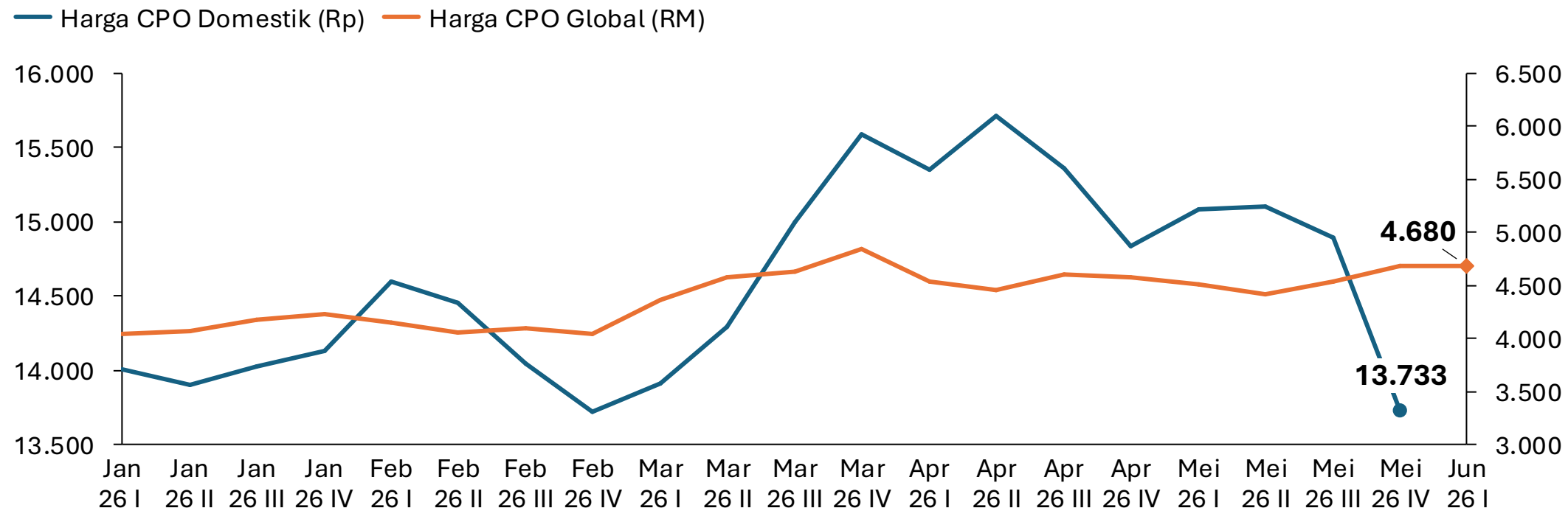
Tren Harga TBS 2026 (Rp)



Perkembangan Volume Ekspor CPO dan Turunannya (Juta Ton)



Harga Minyak Sawit Domestik dan Global



- Di tengah lonjakan harga CPO global yang menyentuh 4.680 RM serta pertumbuhan volume ekspor sebesar 20,4%, pengumuman transisi kebijakan DSI (*Domestic Service Obligation*) justru memicu anomali pasar yang menekan harga TBS sebesar 7,3%, sehingga petani kehilangan momentum keuntungan di saat pasar internasional sedang menguat
- Ketidakselarasan harga CPO juga terlihat dari pasar global ke domestic, di mana harga tender CPO di merosot tajam ke Rp13.733 per kg dari sebelumnya Rp14.888 per kg.
- Penurunan harga TBS mendorong adanya distorsi dengan harga internasional yang tidak terdistribusi secara merata ke level hulu (petani sawit).
- Penurunan harga TBS domestik di tengah penguatan global ini ditengarai dipengaruhi faktor transisi kebijakan dengan dibentuknya PT Danantara Sumberdaya Indonesia (DSI) sebagai pintu tunggal ekspor.
- Namun, Kementerian Pertanian mengindikasikan terjadinya permainan harga pembelian TBS oleh 300 perusahaan sawit yang diduga menjadi kartel sawit.

Trade Discrepancy CPO Indonesia – India : Sinyal Kebocoran Devisa?

Year	Reporter	TradeFlow	Partner	Trade Value (USD)	Quantity (Ton)	Price (USD/Ton)
2020	Indonesia	Export	India	2.870.995.650	4.390.670	653,89
	India	Import	Indonesia	3.096.405.840	4.394.370	704,63
		Δ		-225.410.190	-3.700	-50,74
2021	Indonesia	Export	India	2.078.939.070	1.923.860	1080,61
	India	Import	Indonesia	3.199.203.920	2.806.600	1139,89
		Δ		-1.120.264.850	-882.740	-59,28
2022	Indonesia	Export	India	2.850.988.270	2.883.820	988,62
	India	Import	Indonesia	3.144.736.690	2.711.550	1159,76
		Δ		-293.748.420	172.270	-171,14
2023	Indonesia	Export	India	2.630.254.730	3.118.190	843,52
	India	Import	Indonesia	3.108.217.840	3.338.470	931,03
		Δ		-477.963.110	-220.280	-87,51
2024	Indonesia	Export	India	2.362.040.810	2.620.770	901,28
	India	Import	Indonesia	2.773.761.980	2.808.650	987,58
		Δ		-411.721.170	-187.880	-86,30

- India sebagai salah satu importir terbesar CPO Indonesia, memiliki selisih catatan nilai impor yang lebih tinggi dari pencatatan ekspor Indonesia periode 2020-2024 dengan total mencapai USD 2,53 miliar dengan selisih pencatatan volume 1,12 juta ton.
- Harga rata-rata Indonesia selalu lebih rendah dibanding harga yang tercatat di India.
- Pada tahun 2024, selisih pencatatan data *trade value* impor CPO India mencapai 17,4 persen ekspor Indonesia. Jika sebagian selisih disebabkan oleh biaya CIF-FOB, tetap masih terdapat *gap* yang lebar.
- Pada tahun 2021, selisih pencatatan volume impor CPO India mencapai 45,9 persen dari ekspor Indonesia. **Gap yang sangat lebar tidak serta-merta dapat diidentifikasi sebagai *under-invoicing*, namun terdapat indikasi *joint shipment/cargo*, re-ekspor/*transshipment*, kesalahan klasifikasi HS, atau perbedaan pencatatan periode.**

Kewajiban DHE Lama vs Baru dan Dampaknya terhadap Rantai Nilai Sawit

Aspek	Rezim Lama	Rezim Baru (2026)
Porsi DHE wajib ditempatkan	30%	100%
Masa retensi	3 bulan	12 bulan
Konversi ke rupiah	Hingga 100%	Maksimal 50%
Penempatan dana	Bank devisa	Rekening khusus pada Himbara
Mata uang	Dominan USD	USD dan non-USD (CNY, dll.)

Pelaku Rantai Nilai	Manfaat Strategis	Tantangan Utama
Petani Sawit (Hulu)	<ul style="list-style-type: none"> • Transparansi harga TBS berpotensi meningkat melalui acuan harga internasional yang lebih kredibel. • Praktik perburuan rente dapat ditekan sehingga nilai ekonomi sawit lebih optimal. • Peningkatan devisa dalam negeri berpotensi memperbesar dukungan untuk program peremajaan sawit rakyat (PSR), subsidi, dan peningkatan produktivitas petani. 	<ul style="list-style-type: none"> • Menjadi kelompok yang paling rentan terhadap gejolak transisi kebijakan. • Penurunan harga TBS pasca pengumuman kebijakan menunjukkan tingginya risiko guncangan pasar. • Ketidakjelasan aturan teknis dapat menyebabkan PKS membatasi pembelian TBS. • Minimnya pelibatan petani dalam proses perumusan kebijakan berpotensi memicu resistensi dan ketidakpastian di tingkat akar rumput.
Pabrik Kelapa Sawit (PKS) dan Eksportir (Midstream)	<ul style="list-style-type: none"> • Integrasi tata niaga ekspor dapat meningkatkan transparansi perdagangan, memperkuat pengawasan transaksi, mengurangi potensi manipulasi ekspor, serta memperbesar kontribusi sektor sawit terhadap stabilitas devisa nasional. 	<ul style="list-style-type: none"> • Menghadapi tekanan terbesar dari sisi likuiditas dan operasional. • Kewajiban retensi DHE 100% selama 12 bulan berpotensi mengunci modal kerja dalam jumlah besar. • Pembatasan konversi DHE dapat mengganggu pembayaran kewajiban domestik. • Eksportir independen juga berisiko kehilangan fleksibilitas bisnis, menghadapi kenaikan biaya logistik, perlambatan transaksi, dan penurunan daya saing dibandingkan negara pesaing.
Industri Hilir dan Oleokimia	<ul style="list-style-type: none"> • Transparansi harga dapat memperkuat posisi tawar Indonesia dalam perdagangan global. • Konsolidasi data perdagangan mendukung perencanaan hilirisasi yang lebih baik. • Memperkuat citra Indonesia sebagai pemasok produk sawit yang lebih transparan dan akuntabel. 	<ul style="list-style-type: none"> • Perluasan kebijakan ke produk hilir berpotensi mengganggu kontrak jangka panjang yang telah terbangun dengan pembeli internasional. • Negosiasi melalui mekanisme baru dapat memperpanjang lead time, meningkatkan biaya transaksi, dan mengurangi fleksibilitas bisnis. • Jika tidak dikelola dengan baik, daya saing industri hilir yang menjadi penyumbang devisa terbesar sawit nasional dapat mengalami penurunan dan mendorong pembeli beralih ke negara pemasok lain.



Simulasi Kebijakan DHE Sawit: Perbandingan Ketentuan Lama (2023) dan Baru (2026)

Item	Kebijakan Lama	Kebijakan Baru – Pesimis	Kebijakan Baru – Moderat	Kebijakan Baru – Optimis
Nilai ekspor sawit (US\$ miliar)	35,87	32,28	35,87	39,46
Kewajiban retensi DHE	30% × 3 bulan	100% × 12 bulan	100% × 12 bulan	100% × 12 bulan
DHE tersimpan di dalam negeri (US\$ miliar)	2,69	32,28	35,87	39,46
DHE tersimpan di dalam negeri (Rp triliun)	45,7	548,8	609,8	670,8
Tambahan DHE dibanding skema lama (US\$ miliar)	–	29,59	33,18	36,77
Tambahan DHE dibanding skema lama (Rp triliun)	–	503,1	564,1	625,1
Tambahan likuiditas rata-rata per bulan (US\$ miliar)	–	2,47	2,76	3,06
Tambahan likuiditas rata-rata per bulan (Rp triliun)	–	41,9	47,0	52,1

Asumsi:

Kurs Rp 17.000/USD. Nilai ekspor sawit 2025 = US\$35,87 miliar (GAPKI). Skenario pesimis: ekspor turun 10% akibat gangguan pasar; skenario moderat: ekspor stabil; skenario optimis: ekspor naik 10%.

- Pada skema lama, DHE sawit yang mengendap di sistem keuangan domestik diperkirakan sekitar US\$2,69 miliar atau Rp45,7 triliun.
- Dengan kewajiban retensi 100% selama 12 bulan, stok DHE sawit berpotensi meningkat menjadi Rp548,8–670,8 triliun.
- Tambahan dana yang berada di dalam negeri dibandingkan skema lama diperkirakan mencapai Rp503–625 triliun.
- Tambahan likuiditas yang tersedia bagi sistem keuangan domestik setara sekitar Rp42–52 triliun per bulan.

Tentang INDEF

Institute for Development of Economics and Finance (INDEF) adalah lembaga riset independen di bidang ekonomi dan keuangan yang didirikan pada Agustus 1995 di Jakarta.

INDEF melakukan penelitian dan kajian kebijakan yang mencakup berbagai isu ekonomi dan keuangan, serta mendorong partisipasi dan kesadaran publik dalam proses pengambilan keputusan.

Kami juga berkontribusi dalam merumuskan solusi yang layak bagi berbagai permasalahan ekonomi dan sosial yang kompleks di Indonesia.

Kantor INDEF:

Jl. Batu Merah No.45, Pejaten Timur, Jakarta Selatan 12510

Telp. 021-7901001, Fax. 021-79194018

Email: indef@indef.or.id | Website: www.indef.or.id

